



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan masing-masing Desa yang diaplikasikan dengan sistem keuangan Desa, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Boalemo.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004

18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan Proses Kebijakan Publik di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 112);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 511)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2015 BOALEMO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BOALEMO**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 511), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf a terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- c. tunjangan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. tunjangan Anggota BPD;
- f. tunjangan pengelola aset dan keuangan desa;
- g. insentif LPM, Kader Posyandu, PPKBD/SUB PPKD, Ketua Dasawisma, Pemangku Adat Imam Jamaah, Guru TPA, Pendeta, Guru Sekolah Minggu, Mangku dan Guru Pensantian
- h. uang sidang BPD; dan
- i. honorarium kegiatan.
- j. belanja pegawai lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan hasil musyawarah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- 1. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf b terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran, antara lain :
 - a. bahan;
 - b. jasa kantor;
 - c. pemeliharaan;
 - d. cetak dan penggandaan;
 - e. sewa alat berat;
 - f. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - g. makanan dan minuman;
 - h. pakaian dinas;
 - i. perjalanan dinas;
 - j. bahan bakar minyak;
 - k. upah tenaga kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat;

- r. pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat; dan
 - o. pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan
 - p. Kegiatan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan hasil musyawarah desa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
 - (3) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diberikan dalam bentuk uang penghargaan, beasiswa, uang operasional dan santunan.
 - (4) Pemberian uang penghargaan dan/atau uang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan antara lain kepada:
 - a. lembaga pendidikan tingkat desa;
 - b. lembaga kesehatan tingkat desa;
 - c. lembaga ekonomi tingkat desa;
 - d. lembaga sosial dan budaya tingkat desa;
 - e. lembaga keagamaan tingkat desa; dan
 - f. lembaga kemasyarakatan desa.
 - (5) Pemberian uang beasiswa dan/atau santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan antara lain kepada:
 - a. siswa berprestasi;
 - b. masyarakat berprestasi;
 - c. masyarakat miskin; dan
 - d. masyarakat atau orang terlantar.
3. Ketentuan Pasal 20 Ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, digunakan untuk belanja dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain :
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal sarana dan prasarana perkantoran;
 - c. belanja modal sarana dan prasarana transportasi;
 - d. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana produksi;
 - e. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana perekonomian;
 - f. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana sosial dan atau keagamaan;
 - g. belanja modal sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - h. belanja modal sarana dan prasarana kesehatan.
 - i. belanja modal lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan hasil musyawarah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan pasal 54 ayat 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 54

- (1) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap pendapatan dan belanja desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Penatausahaan pendapatan dan belanja desa menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank desa.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format, bentuk, dan struktur penatausahaan pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 14 FEBRUARI 2017

 **Pj. BUPATI BOALEMO,**

 **YUSUF GIASI**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 14 FEBRUARI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


HUSAIN. A. ETANGO

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650725 198801 1 002

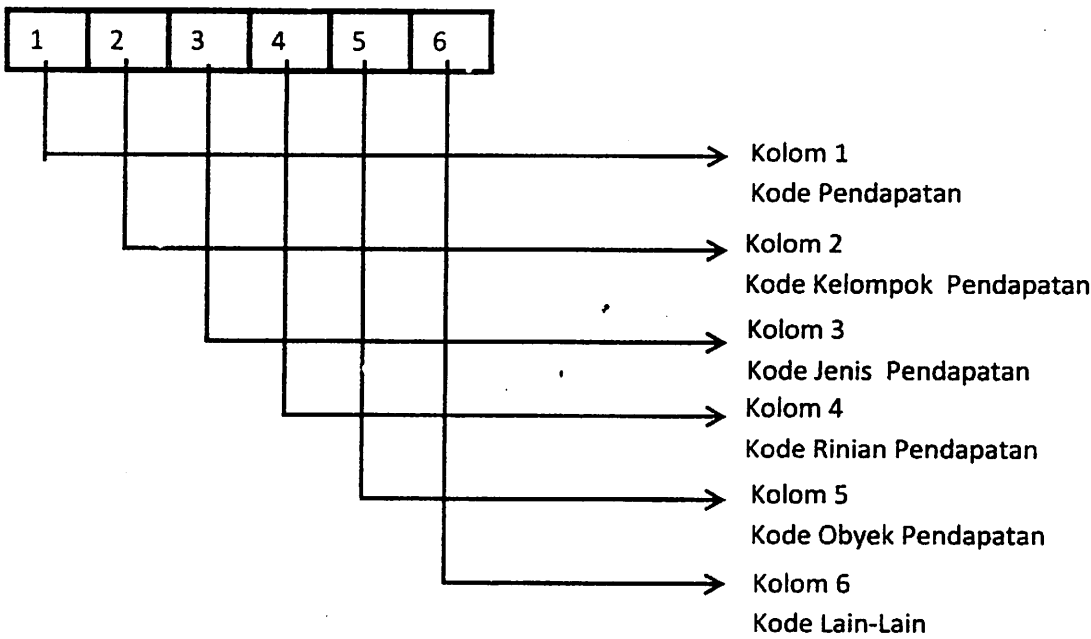
(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR 615)

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR : 6 TAHUN 2017
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN BOALEMO

BENTUK, FORMAT, STRUKTUR KODE REKENING, RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA, RAB DAN BUKU PEMBANTU KAS KEGIATAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB, KWITANSI BELANJA, NOTA PESANAN, BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG, BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA, RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA, DAN BUKU PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. KODE REKENING

A. Kode Rekening Pendapatan Desa

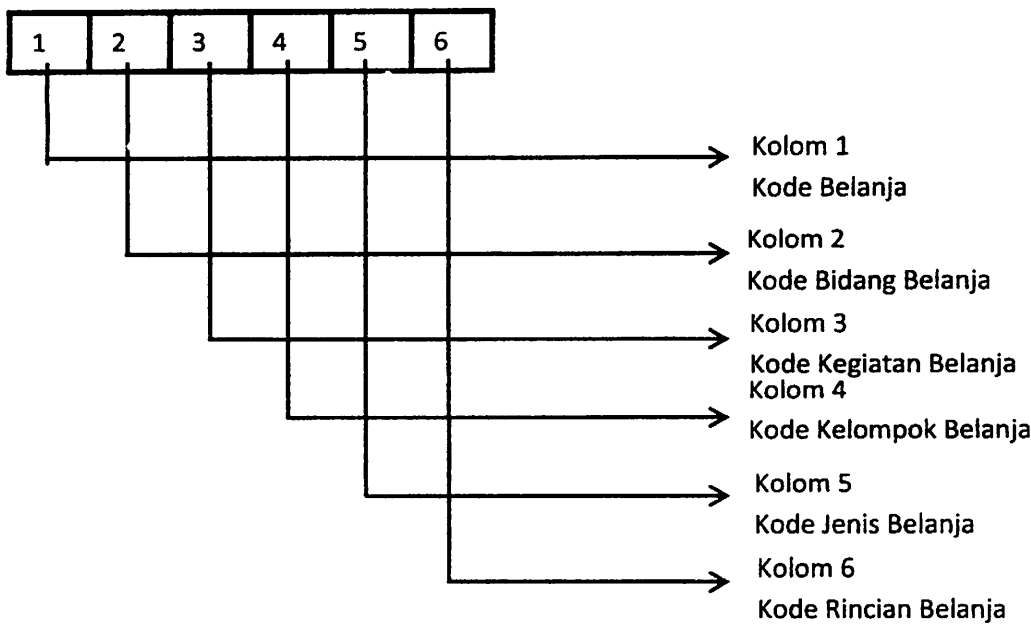


B. Penjabaran Kode Rekening Pendapatan Desa

KODE REKENING						URAIAN
1	2	3	4	5	6	
1						Pendapatan
1	1					Pendapatan Asli Desa
1	1	1				Hasil Usaha
1	1	1	1			Hasil Laba BUMDes
1	1	2				Hasil Aset Desa
1	1	2	1			Tanah Desa
1	1	2	1	1		Tanah Kas Desa
1	1	2	1	2		Tanah Benkok
1	1	2	1	3	
1	1	2	2			Pasar Desa

1	1	2	3		Pasar Buah
1	1	2	4		Bangunan Desa
1	1	2	4	1	Kios Desa
1	1	2	4	2	Gedung Pertemuan Desa
1	1	2	4	3	Gedung Olah Raga
1	1	2	4	4	Bangunan Desa Lainnya
1	1	2	5		Hutan Milik Desa
1	1	2	6		Mata Air Milik Desa
1	1	2	7		Pemadidan Umum
1	1	2	8		Obyek Rekreasi Desa
1	1	2	9		Lapangan Desa
1	1	2	10		Aset Desa Lainnya
1	1	3			Swadaya, Partispasi dan Gotong Royong
1	1	3	1		Swadaya, Partispasi
1	1	3	2		Gotong Royong
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa
1	1	4	1		Pungutan Desa
1	1	4	2		Hasil Penjualan Kekayaan Desa selain Tanah yang dipisahkan
1	1	4	3		Hasil Pelepasan Tanah desa Tahun Berjalan
1	1	4	4		Bunga Simpanan Uang di Bank
1	2				Pendapatan Transfer
1	2	1			Dana Desa
1	2	2			Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1	2	3			Alokasi Dana Desa
1	2	4			Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
1	2	5			Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
1	3				Pendapatan Lain-lain
1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat
1	3	2			Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
1	3	2	1		Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
1	3	2	2		Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa

C. KODE REKENING BELANJA



D. PENJABARAN KODE REKENING BELANJA

KODE REKENING						URAIAN
2						Belanja Desa
2	1					Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	2					Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2	3					Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2	4					Bidang Pembetdayaan Masyarakat
2		1				Kegiatan
		2				Dst.....
2			1			Belanja Pegawai
2			1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa
2			1	1	2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
2			1	2		Penghasilan Staf Pemerintah Desa
2			1	3		Penghasilan Tambahan
2			1	3	1	Penghasilan Tambahan Kepala Desa
2			1	3	2	Penghasilan Tambahan Perangkat Desa
2			1	4		Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	4	1	Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa
2			1	4	2	Tunjangan akhir masa jabatan Perangkat Desa
2			1	5		Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	5	1	Tunjangan Kepala Desa
2			1	5	2	Tunjangan Perangkat Desa

2			1	6		Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	6	1	Tunjangan Penjabat Kepala Desa
2			1	6	2	Tunjangan Penjabat Perangkat Desa
2			1	7		Tunjang BPD
2			1	7	1	Tunjangan Ketua BPD
2			1	7	2	Tunjangan Sekretaris BPD
2			1	7	3	Tunjangan Anggota BPD
2			1	8		Uang Sidang BPD
2			1	9		Insentif LPM, Kader Posyandu, PPKBD/SUB PPKD, Ketua Dasawisma, Imam Jamah, Guru TPA, Pedeta, Guru Sekolah Minggu, Mangku, Guru Pensatian
2			1	9	1	Insentif LPM
2			1	9	2	Insentif Kader Posyandu
2			1	9	3	Insentif PPKBD/SUB PPKD
2			1	9	4	Insentif Ketua Dasawisma
2			1	9	5	Insentif Imam Jamah
2			1	9	6	Insentif Guru TPA
2			1	9	7	Insentif Pendeta
2			1	9	8	Insentif Guru Sekolah Minggu
2			1	9	10	Insentif Mangku
2			1	9	11	Insentif Guru Pensatian
2			1	10		Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	10	1	Operasional Kepala Desa
2			1	10	2	Operasional Perangkat Desa
2			1	11		Tunjangan Pengelola asset dan Keuangan Desa
2			1	11	1	Tunjangan Bendahara
2			1	11	2	Tunjangan Pembantu Bendahara
2			1	11	3	Tunjangan Pengurus Barang Desa
2			1	11	4	Tunjangan Pembantu Pengurus Barang Desa
2			2			Belanja Barang dan Jasa
2			2	1		Belanja Bahan

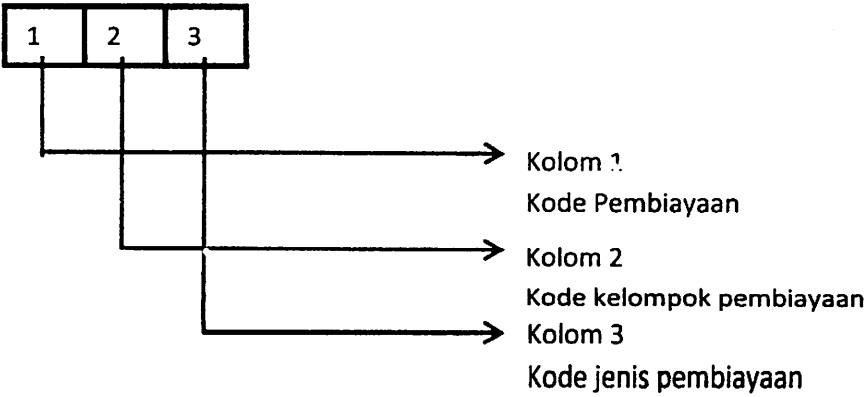
2			2	1	1	Belanja Bahan Alat Tulis Kantor
2			2	1	2	Belanja Perlengkapan Kantor
2			2	1	3	Belanja Peralatan Kantor
2			2	2		Belanja Jasa Kantor
2			2	2	1	Belanja Telpon
2			2	2	2	Belanja Air
2			2	2	3	Belanja Listrik
2			2	2	4	Belanja Surat Kabar/Majalah
2			2	2	5	Belanja Perangko
2			2	2	6	Belanja Alat Kebersihan
2			2	2	7	Belanja Langganan Internet
2			2	2	8	Belanja Lain-Lain
2			2	3		Belanja Pemeliharaan
2			2	3	1	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan atau gedung
2			2	3	2	Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
2			2	3	3	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor
2			2	3	4	Belanja Pemeliharaan computer
2			2	3	5	Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas
2			2	3	6	Belanja Pemeliharaan taman
2			2	3	7	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
2			2	3	8	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana produksi
2			2	3	9	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian
2			2	3	10	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana sosial/keagamaan
2			2	3	11	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
2			2	3	12	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
2			2	3	13	Belanja Pemeliharaan lainnya

2			2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan
2			2	4	1	Belanja penggandaan
2			2	4	2	Belanja Cetak dan Jilid
2			2	5		Sewa Alat Berat
2			2	5	1	Belanja Sewa Eskavator
2			2	5	2	Belanja Sewa Motopr Greader
2			2	5	3	Belanja Sewa alatlainnya
2			2	5	4	Sewa Alat Berat
2			2	6		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
2			2	6	1	Belanja sewa meja dan kursi
2			2	6	2	Belanja sewa tenda
2			2	6	3	Belanja sewa soundsystem
2			2	7		Belanja makan dan minum
2			2	7	1	Belanja makan dan minum rapat
2			2	7	2	Belanja makan dan minum peninjauan
2			2	7	3	Belanja makan dan minum tamu
2			2	8		Belanja pakaian dinas
2			2	8	1	Belanja pakaian dinas Kepala Desa
2			2	8	2	Belanja pakaian dinas Perangkat Desa
2			2	8	3	Belanja Pakaian Lainnya
2			2	9		Belanja Perjalanan dinas
2			2	9	1	Belanja Perjalanan dinas Dalam daerah
2			2	9	2	Belanja Perjalanan dinas luar daerah
2			2	10		Belanja Bahan bakar minyak

2			2	11		Upah Tenaga Kerja
2			2	12		Honorarium narasumber/ahli
2			2	13		Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok lain
2			2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat
2			2	14	1	Uang penghargaan/operasional
2			2	14	2	Beasiswa / santunan
2			3			Belanja Modal
2			3	1		Belanja Modal Tanah
2			3	1	1	Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor
2			3	2		Belanja modal sarana dan prasarana perkantoran
2			3	2	1	Belanja printer/computer
2			3	2	2	Belanja Meja Kursi
2			3	2	3	Belanja lemari
2			3	2	4	Belanja filling cabinet
2			3	2	5	Belanja rak arsip
2			3	2	6	Belanja modal gedung kantor
2			3	2	7	Belanja kendaraan dinas
2			3	3		Belanja Modal pembangunan sarana dan prasarana
2			3	3	1	Belanja Modal Jalan
2			3	3	2	Belanja Modal Jembatan
2			3	3	3	Belanja Modal gorong-gorong
2			3	3	4	Belanja Modal drainase
2			3	3	5	Belanja Modal talud jalan
2			3	4		Belanja Modal pembangunan sarana dan prasarana produksi
2			3	4	1	Belanja Modal dam/bendungan

2			3	4	2	Belanja Modal Irigasi
2			3	4	3	Belanja Modal Bangunan gedung pertanian
2			3	4	4	Belanja modal peralatan pertanian
2			3	5		Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana perekonomian
2			3	5	1	Belanja Modal pasar desa
2			3	5	2	Belanja modal kios desa
2			3	6		Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana sosial/keagamaan
2			3	6	1	Belanja modal pembangunan tempat ibadah
2			3	7		Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
2			3	7	1	Belanja modal untuk kegiatan pendidikan
2			3	7	2	Belanja modal peralatan pendidikan
2			3	8		Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
2			3	8	1	Belanja Modal bangunan kegiatan kesehatan
2			2	8	2	Belanja modal bahan kesehatan
2			2	8	3	Belanja modal peralatan kesehatan

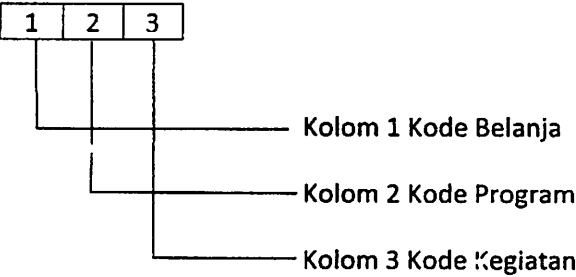
E. KODE REKENING BELANJA



F. PENJABARAN KODE REKENING PEMBIAYAAN

KODE REKENING						URAIAN
3						PEMBIAYAAN
3	1					Penerimaan pembiayaan
3	1	1				SILPA
3	1	2				Pencairan dana cadangan
3	1	3				Hasil kekayaan desa yang dipisahkan
3	2					Pengeluaran pembiayaan
3	2	1				Pembentukan dana cadangan
3	2	2				Penyertaan modal desa

G. KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN



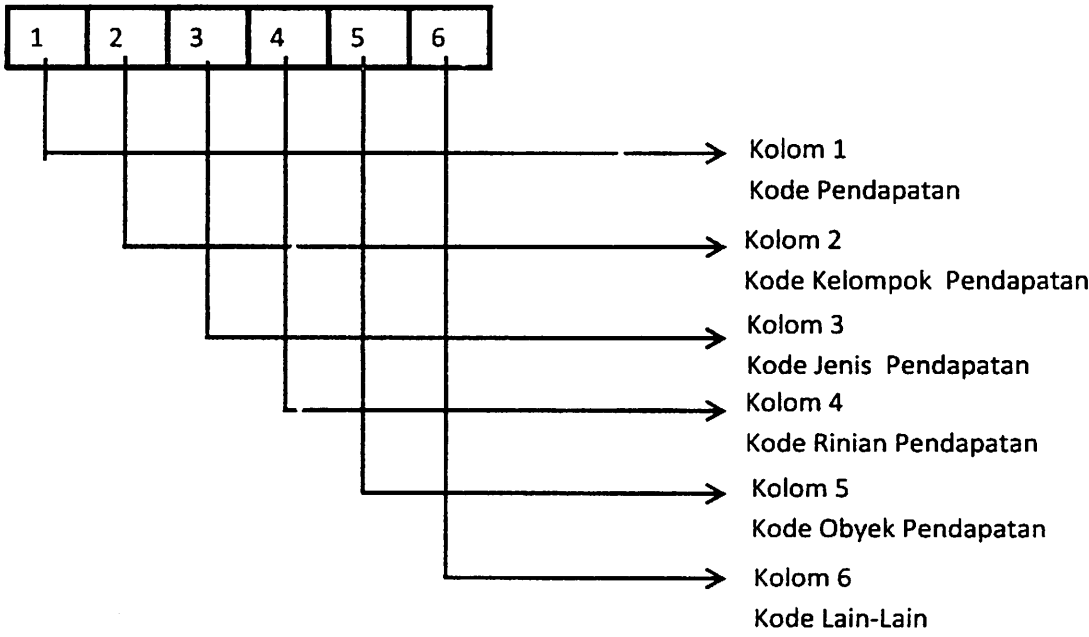
H. PENJABARAN KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE REKENING					URAIAN
2					BELANJA DESA
2	1				BIDANG PENYELENGGARAAN DESA
2	1	1			Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2	1	2			Kegiatan Operasional Kantor Desa
2	1	3			Kegiatan Operasional BPD
2	1	4			Kegiatan Operasional RT/RW
2	1	5			Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
2	1	6			Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa
2	1	7			Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa
2	1	8			Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Desa
2	1	9			Kegiatan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa
2	2				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2	2	1			Pengadaan,Pembangunan Sarpras Lingkungan Pemukiman
2	2	2			Pengembangan dan Pemeliharaan Sarpras Lingkungan Pemukiman
2	2	3			Pengadaan,Pembangunan,Pengembangan dan Pemeliharaan Sarpras Transportasi
2	2	4			Pengadaan,Pembangunan,Pengembangan dan Pemeliharaan Sarpras Energi
2	2	5			Pengadaan,Pembangunan Sarpras Infomasi & Komunikasi
2	2	6			Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarpras infomasi & Komunikasi
2	2	7			Pembangunan,Pengembangan dan Pemeliharaan Sarpras Kesehatan
2	2	8			Pengadaan,Pembangunan,Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarpras Dikbud
2	2	9			Pengadaan,Pembangunan Sarpras Produksi Usaha Pertanian
2	2	10			Pengembangan dan Pemeliharaan Sarpras Produksi Usaha Pertanian
2	2	11			Pengadaan,Pembangunan Sarpras Pengolahaan Hasil Pertanian
2	2	12			Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarpras Pengolahaan Hasil Pertanian
2	2	13			Pengadaan,Pembangunan Sarpras Jasa & Industri Kecil
2	2	14			Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarpras Jasa & Industri Kecil
2	2	15			Pengadaan,Pembangunan Sarpras Pemasaran
2	2	16			Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarpras Pemasaran
2	2	17			Pengadaan,Pembangunan Sarpras Desa Wisata
2	2	18			Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarpras Desa Wisata
2	2	19			Pengadaan,Pembangunan Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarpras TTG
2	2	20			Pengadaan,Pembangunan Sarpras Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup
2	2	21			Pengembangan dan Pemeliharaan Sarpras Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup
2	2	22			Pengadaan,Pembangunan Sarpras Penanggulangan Bencana
2	2	23			Pengembangan & Pemeliharaan Sarpras Penanggulangan Bencana

3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3	3	1			Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
3	3	2			Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
3	3	3			Kegiatan Peimbninaan Organisasi Perempuan/PKK
3	3	4			Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya
3	3	5			Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
3	3	6			Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
3	3	7			Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
3	3	8			Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
3	3	9			Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu
4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4	4	1			Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
4	4	2			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
4	4	3			Kegiatan Pemberdayaan Posyandu,UP2K dan BKB
4	4	4			Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna
4	4	5			Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
4	4	6			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
4	4	7			Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
4	4	8			Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
4	4	9			Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa
4	4	10			Pengelolaan Transportasi Desa
4	4	11			Pengembangan Energi Terbarukan
4	4	12			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
4	4	13			Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian
4	4	14			Pengelolaan Hasil Produksi Usaha Pertanian
4	4	15			Pengelolaan Usaha Jasa & Industri Kecil
4	4	16			Pendirian & Pengembangan BUMDesa
4	4	17			Pengembangan Usaha BUMDesa Pada Satu Produk Unggulan
4	4	18			Pengembangan Usaha BUMDesa Pada Usaha Layanan Jasa
4	4	19			Pembentukan & Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4	4	20			Pengembangan & Pemanfaatan TTG
4	4	21			Pengelolaan Pemasaran hasil Produksi Usaha BUMDesa
4	4	22			Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Desa
4	4	23			Pelestarian Lingkungan Hidup
4	4	24			Kegiatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Desa
4	4	25			Kegiatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
4	4	26			Kegiatan Pembangunan Desa
4	4	27			Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Desa
4	4	28			Menyusun Perencanaan dan Penganggaran Pada Warga Miskin dll
4	4	29			Mengembangkan Sistem Transparansi & Akuntabilitas
4	4	30			Mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan & Lembaga Adat
4	4	31			Kegiatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Desa
4	4	32			Kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa yang Berkelanjutan
4	4	33			Kegiatan Peningkatan Kualitas & Kapasitas SDM
5					BIDANG TIDAK TERDUGA
5	5	1			Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
5	5	2			Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain

II. KODE REKENING

G. Kode Rekening Pendapatan Desa

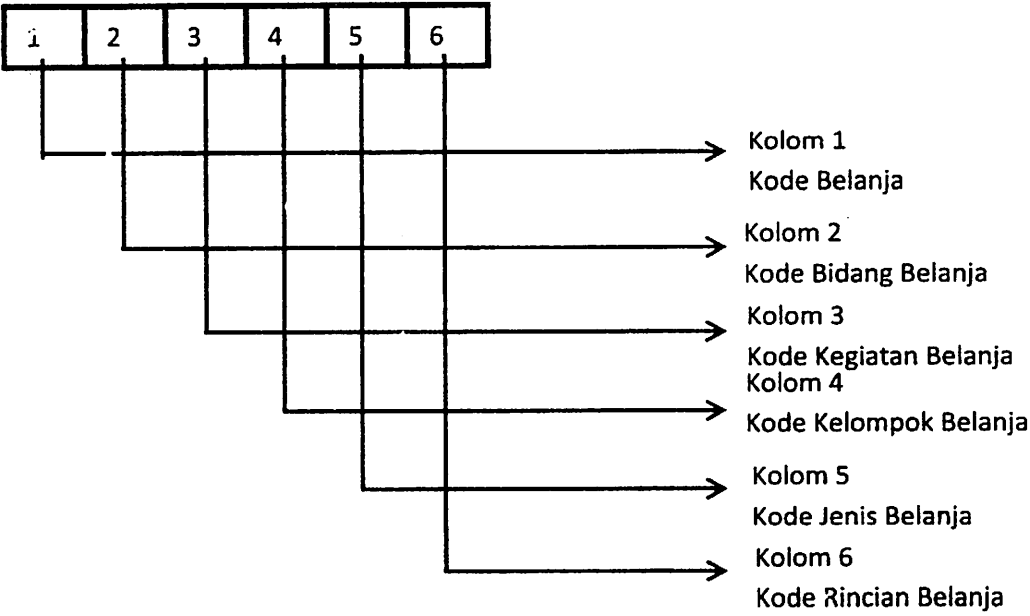


H. Penjabaran Kode Rekening Pendapatan Desa

KODE REKENING						URAIAN
1	2	3	4	5	6	
1						Pendapatan
1	1					Pendapatan Asli Desa
1	1	1				Hasil Usaha
1	1	1	1			Hasil Laba BUMDes
1	1	2				Hasil Aset Desa
1	1	2	1			Tanah Desa
1	1	2	1	1		Tanah Kas Desa
1	1	2	1	2		Tanah Benkok
1	1	2	1	3	
1	1	2	2			Pasar Desa
1	1	2	3			Pasar Buah
1	1	2	4			Bangunan Desa
1	1	2	4	1		Kios Desa
1	1	2	4	2		Gedung Pertemuan Desa
1	1	2	4	3		Gedung Olah Raga
1	1	2	4	4		Bangunan Desa Lainnya
1	1	2	5			Hutan Milik Desa
1	1	2	6			Mata Air Milik Desa
1	1	2	7			Pemadian Umum
1	1	2	8			Obyek Rekreasi Desa
1	1	2	9			Lapangan Desa

1	1	2	10			Aset Desa Lainnya
1	1	3				Swadaya, Partispasi dan Gotong Royong
1	1	3	1			Swadaya, Partispasi
1	1	3	2			Gotong Royong
1	1	4				Lain-lain Pendapatan Asli Desa
1	1	4	1			Pungutan Desa
1	1	4	2			Hasil Penjualan Kekayaan Desa selain Tanah yang dipisahkan
1	1	4	3			Hasil Pelepasan Tanah desa Tahun Berjalan
1	1	4	4			Bunga Simpanan Uang di Bank
1	2					Pendapatan Transfer
1	2	1				Dana Desa
1	2	2				Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1	2	3				Alokasi Dana Desa
1	2	4				Eantuan Keuangan dari APBD Provinsi
1	2	5				Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
1	3					Pendapatan Lain-lain
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat
1	3	2				Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
1	3	2	1			Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
1	3	2	2			Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa

I. KODE REKENING BELANJA



J. PENJABARAN KODE REKENING BELANJA

KODE REKENING						URAIAN
2						Belanja Desa
2	1					Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	2					Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2	3					Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2	4					Bidang Pembetdayaan Masyarakat
2		1				Kegiatan
		2				Dst.....
2			1			Belanja Pegawai
2			1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa
2			1	1	2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
2			1	2		Penghasilan Staf Pemerintah Desa
2			1	3		Penghasilan Tambahan
2			1	3	1	Penghasilan Tambahan Kepala Desa
2			1	3	2	Penghasilan Tambahan Perangkat Desa
2			1	4		Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	4	1	Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa
2			1	4	2	Tunjangan akhir masa jabatan Perangkat Desa
2			1	5		Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	5	1	Tunjangan Kepala Desa
2			1	5	2	Tunjangan Perangkat Desa
2			1	6		Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	6	1	Tunjangan Penjabat Kepala Desa
2			1	6	2	Tunjangan Penjabat Perangkat Desa
2			1	7		Tunjang BPD
2			1	7	1	Tunjangan Ketua BPD
2			1	7	2	Tunjangan Sekretaris BPD
2			1	7	3	Tunjangan Anggota BPD
2			1	8		Uang Sidang BPD
2			1	9		Insentif LPM, Kader Posyandu, PPKBD/SUB PPKD, Ketua Dasawisma, Imam Jamah, Guru TPA, Pedeta, Guru Sekolah Minggu, Mangku, Guru Pensatian
2			1	9	1	Insentif LPM

2			1	9	2	Insentif Kader Posyandu
2			1	9	3	Insentif PPKBD/SUB PPKD
2			1	9	4	Insentif Ketua Dasawisma
2			1	9	5	Insentif Imam Jamah
2			1	9	6	Insentif Guru TPA
2			1	9	7	Insentif Pendeta
2			1	9	8	Insentif Guru Sekolah Minggu
2			1	9	10	Insentif Mangku
2			1	9	11	Insentif Curu Pensatian
2			1	10		Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	10	1	Operasional Kepala Desa
2			1	10	2	Operasional Perangkat Desa
2			1	11		Tunjangan Pengelola asset dan Keuangan Desa
2			1	11	1	Tunjangan Bendahara
2			1	11	2	Tunjangan Pembantu Bendahara
2			1	11	3	Tunjangan Pengurus Barang Desa
2			1	11	4	Tunjangan Pembantu Pengurus Barang Desa
2			2			Belanja Barang dan Jasa
2			2	1		Belanja Bahan
2			2	1	1	Belanja Bahan Alat Tulis Kantor
2			2	1	2	Belanja Perlengkapan Kantor
2			2	1	3	Belanja Peralatan Kantor
2			2	2		Belanja Jasa Kantor
2			2	2	1	Belanja Telpon
2			2	2	2	Belanja Air
2			2	2	3	Belanja Listrik
2			2	2	4	Belanja Surat Kabar/Majalah
2			2	2	5	Belanja Perangko
2			2	2	6	Belanja Alat Kebersihan

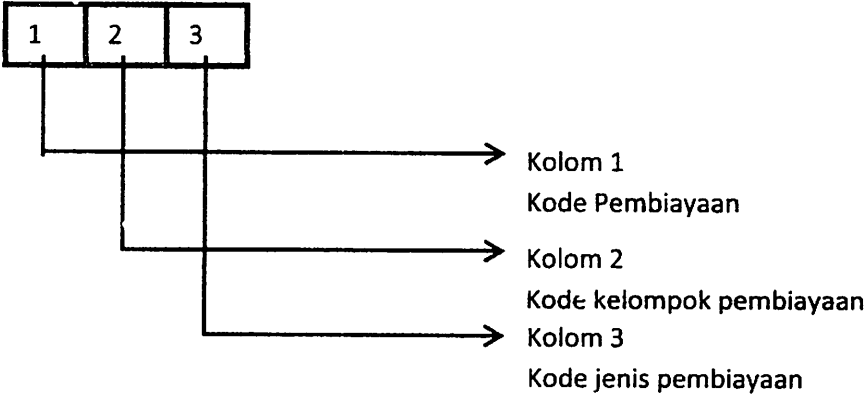
2			2	2	7	Belanja Langganan Internet
2			2	2	8	Belanja Lain-Lain
2			2	3		Belanja Pemeliharaan
2			2	3	1	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan atau gedung
2			2	3	2	Belanja Pemeliharaan perlatan kantor
2			2	3	3	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor
2			2	3	4	Belanja Pemeliharaan komputer
2			2	3	5	Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas
2			2	3	6	Belanja Pemeliharaan taman
2			2	3	7	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
2			2	3	8	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana produksi
2			2	3	9	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian
2			2	3	10	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana sosial/keagamaan
2			2	3	11	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
2			2	3	12	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
2			2	3	13	Belanja Pemeliharaan lainnya
2			2	4		Belanja Cetak dan Penggandaan
2			2	4	1	Belanja penggandaan
2			2	4	2	Belanja Cetak dan Jilid
2			2	5		Sewa Alat Berat
2			2	5	1	Belanja Sewa Eskavator
2			2	5	2	Belanja Sewa Motopr Grader
2			2	5	3	Belanja Sewa alatlainnya
2			2	5	4	Sewa Alat Berat
2			2	6		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor

2			2	6	1	Belanja sewa meja dan kursi
2			2	6	2	Belanja sewa tenda
2			2	6	3	Belanja sewa soundsystem
2			2	7		Belanja makan dan minum
2			2	7	1	Belanja makan dan minum rapat
2			2	7	2	Belanja makan dan minum peninjauan
2			2	7	3	Belanja makan dan minum tamu
2			2	8		Belanja pakaian dinas
2			2	8	1	Belanja pakaian dinas Kepala Desa
2			2	8	2	Belanja pakaian dinas Perangkat Desa
2			2	8	3	Belanja Pakaian Lainnya
2			2	9		Belanja Perjalanan dinas
2			2	9	1	Belanja Perjalanan dinas Dalam daerah
2			2	9	2	Belanja Perjalanan dinas luar daerah
2			2	10		Belanja Bahan bakar minyak
2			2	11		Upah Tenaga Kerja
2			2	12		Honorarium narasumber/ahli
2			2	13		Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok lain
2			2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat
2			2	14	1	Uang penghargaan/operasional
2			2	14	2	Beasiswa / santunan
2			3			Belanja Modal
2			3	1		Belanja Moda Tanah
2			3	1	1	Belanja Moda tanah

2			3	2		Belanja modal sarana dan prasarana perkantoran
2			3	2	1	Belanja printer/computer
2			3	2	2	Belanja Meja Kursi
2			3	2	3	Belanja lemari
2			3	2	4	Belanja filling cabinet
2			3	2	5	Belanja rak arsip
2			3	2	6	Belanja modal gedung kantor
2			3	2	7	Belanja kendaraan dinas
2			3	3		Belanja Modal pembangunan sarana dan prasarana
2			3	3	1	Belanja Modal Jalan
2			3	3	2	Belanja Modal Jembatan
2			3	3	3	Belanja Modal gorong-gorong
2			3	3	4	Belanja Modal drainase
2			3	3	5	Belanja Modal talud jalan
2			3	4		Belanja Modal pembangunan sarana dan prasarana produksi
2			3	4	1	Belanja Modal dam/bendungan
2			3	4	2	Belanja Modal Irigasi
2			3	4	3	Belanja Modal Bangunan gedung pertanian
2			3	4	4	Belanja modal peralatan pertanian
2			3	5		Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana perekonomian
2			3	5	1	Belanja Modal pasar desa
2			3	5	2	Belanja modal kios desa
2			3	6		Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana sosial/keagamaan
2			3	6	1	Belanja modal pembangunan tempat ibadah

2			3	7		Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
2			3	7	1	Belanja modal untuk kegiatan pendidikan
2			3	7	2	Belanja modal peralatan pendidikan
2			3	8		Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
2			3	8	1	Belanja Modal bangunan kegiatan kesehatan
2			2	8	2	Belanja modal bahan kesehatan
2			2	8	3	Belanja modal peralatan kesehatan

K. KODE REKENING BELANJA



L. PENJABARAN KODE REKENING PEMBIAYAAN

KODE REKENING						URAIAN
3						PEMBIAYAAN
3	1					Penerimaan pembiayaan
3	1	1				SILPA
3	1	2				Pencairan dana cadangan
3	1	3				Hasil kekayaan desa yang dipisahkan
3	2					Pengeluaran pembiayaan
3	2	1				Pembentukan dana cadangan
3	2	2				Penyertaan modal desa

III. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun
..... tentang (Lembaran daerah Kabupaten
..... Tahun Nomor);
6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
Rp.....
2. Belanja Desa
- | | |
|---|----------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp..... |
| | ===== |
3. Pembiayaan Desa
- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp..... |
| | ===== |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini
berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Lampiran Peraturan Desa

Nomor :
Tahun :
Tentang : Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

URAIAN							ANGGARAN (Rp.)	KETERANG AN
2							3	4
1							PENDAPATAN	
1	1						Pendapatan Asli Desa	
1	1	1					Hasil Usaha	
1	1	1	1				Hasil Laba Bumdes	
1	1	2					Hasil Aset Desa	
1	1	2	1				Tanah Desa	
1	1	2	2				Tanah Benkok	
1	1	2	3				Pasar desa	
1	1	2	4				Pasar Hewan	
1	1	2	5				Bangunan Desa	
1	1	2	5	1			Kios Desa	
1	1	2	5	2			Gedung Pertemuan Desa	
1	1	2	5	3			Gedung Olah Raga	
1	1	2	5	4			Bangunan Desa Lainnya	
1	1	2	6				Hutan Milik Desa	
1	1	2	7				Mata Air Milik Desa	
1	1	2	8				Pemandian Umum	
1	1	2	9				Obyek Rekreasi Desa	
1	1	2	10				Lapangan Desa	
1	1	2	11				Aset Desa Lainnya	
1	1	2	11	1			Bentor	
1	1	2	11	2			Gedung	
1	1	3					Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
1	1	3	1				Swadaya dan Partisipasi	
1	1	3	2				Gotong Royong	
1	1	4					Lain-lain Pendapatan Asli Desa	
1	1	4	1				Pungutan Desa	
1	1	4	2				Hasil Penjualan Kekayaan selain Tanah yang dipisahkan	
1	1	4	3				Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun berjalan	
1	1	4	4				Bunga Simpanan Uang di Bank	
1	2						Pendapatan Transfer	
1	2	1					Dana Desa	
1	2	2					Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1	2	3					Alokasi Dana Desa	

1	2	4				Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		
1	2	5				Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten		
1	3					Pendapatan Lain-lain		
1	3	1				Hiba dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat		
1	3	2				Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		
1	3	2	1			Hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga		
1	3	2	2			Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa		
						Jumlah Pendapatan		
2						BELANJA DESA		
2	1					BIDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
2	1	1				Pembayaran Penghasilan tetpa Kepala Desa dan perangkat desa		
2	1	1	1			Belanja Pegawai		
2	1	1	1	1		Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa		
2	1	1	1	1	1	Penghasilan tetap kepala desa		
2	1	1	1	1	2	Penghasilan tetap perangkat desa		
2	1	1	1	2		Penghasilan Staf Pemerintah Desa		
2	1	1	1	5		Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	1	1	5	1	Tunjangan Kepala Desa		
						- Tunjang Kesehatan		
						- Tunjangan Kecelakaan		
						- Tunjangan Kematian		
						- Tunjangan lain-lain		
2	1	1	1	5	2	Tunjangan Perangkat Desa		
						- Tunjang Kesehatan		
						- Tunjangan Kecelakaan		
						- Tunjangan Kematian		
						- Tunjangan lain-lain		
2	1	1	1	6		Tunjangan pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	1	1	6	1	Tunjangan pejabat Kepala		
2	1	1	1	6	2	Tunjangan Perangkat Desa		
2	1	2				Operasional perkantoran desa		
2	1	2	1			Belanja Pegawai		
2	1	2	1	10		Operasional Kepala desa dan perangkat desa		
2	1	2	1	10	1	Operasional Kepala Desa		
2	1	2	1	10	2	Operasional Perangkat Desa		
2	1	1	1	11		Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan		
2	1	1	1	11	1	Tunjangan Bendahara		
2	1	1	1	11	2	Tunjangan Pembantu Bendahara		
2	1	1	1	11	3	Tunjangan Pengurus Barang		
2	1	1	1	11	4	Tunjangan Pembantu Pengurus Barang		

2	1	2	2			Belanja Barang dan jasa		
2	1	2	2	1		Belanja bahan		
2	1	2	2	1	1	Belanja alat tulis kantor		
2	1	2	2	1	2	Belanja perlengkapan kantor		
2	1	2	2	1	3	Belanja Perlatan kantor		
2	1	2	2	2		Belanja jasa kantor		
2	1	2	2	2	1	Belanja telepon		
2	1	2	2	2	2	Belanja air		
2	1	2	2	2	3	Belanja listrik		
2	1	2	2	2	4	Belanja surat kabar/majalah		
2	1	2	2	2	5	Belanja perangko/materai		
2	1	2	2	2	6	Belanja alat kebersihan		
2	1	2	2	2	7	Belanja langganan internet		
2	1	2	2	2	8	Belanja lain-lain		
2	1	2	2	3		BelanjaPemeliharaan		
2	1	2	2	3	1	Belanja pemeliharaan bangunan desa		
2	1	2	2	3	2	Belanja pemeliharaan peralatan kantor		
2	1	2	2	3	3	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor		
2	1	2	2	3	4	Belanja pemeliharaan komputer		
2	1	2	2	3	5	Belanja pemeliharaan Kendaraan dinas		
2	1	2	2	3	6	Belanja pemeliharaan taman		
2	1	2	2	3	7	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi		
2	1	2	2	3	8	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana produksi		
2	1	2	2	3	9	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian		
2	1	2	2	3	10	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana sosil/keagamaan		
2	1	2	2	3	11	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan		
2	1	2	2	3	12	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan		
2	1	2	2	3	13	Belanja pemeliharaan lainnya		
2	1	2	2	4		Belanja cetak dan penggandaan		
2	1	2	2	4	1	Belanja pengadaan		
2	1	2	2	4	2	Belanja cetak dan jilid		
2	1	2	2	6		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor		
2	1	2	2	6	1	Belanja sewa meja dan kursi		
2	1	2	2	6	2	Belanja sewa tenda		
2	1	2	2	6	3	Belanja sewa soundsystem		
2	1	2	2	7		Belanja makan dan minum		
2	1	2	2	7	1	Belanja makan dan minum rapat		
2	1	2	2	7	2	Belanja makan dan minum peninjauan		
2	1	2	2	7	3	Belanja makan dan minum tamu		
2	1	2	2	8		Belanja pakaian dinas		
2	1	2	2	8	1	Belanja pakaian dinas Kepala Desa		
2	1	2	2	8	2	Belanja pakaian dinas Perangkat Desa		
2	1	2	2	8	3	Belanja Pakaian Lainnya		

2	1	2	2	9		Belanja Perjalanan dinas		
2	1	2	2	9	1	Belanja Perjalanan dinas Dalam daerah		
2	1	2	2	9	2	Belanja Perjalanan dinas luar daerah		
2	1	2	2	10		Belanja Bahan bakar minyak		
2	1	2	2	10	1	Upah Tenaga Kerja		
2	1	2	2	10	2	Honorarium narasumber/ahli		
2	1	2	3			Belanja Modal		
2	1	2	3	1		Belanja Modal Tanah		
2	1	2	3	1	1	Belanja Modal Tanah		
2	1	2	3	2		Belanja modal sarana dan prasarana perkantoran		
2	1	2	3	2	1	Belanja printer/computer		
2	1	2	3	2	2	Belanja Meja Kursi		
2	1	2	3	2	3	Belanja lemari		
2	1	2	3	2	4	Belanja filling cabinet		
2	1	2	3	2	5	Belanja rak arsip		
2	1	2	3	2	6	Belanja modal gedung kantor		
2	1	2	3	2	7	Belanja kendaraan dinas		
2	1	3				Pembayaran Tunjangan BPD dan Operasional BPD		
2	1	3	1			Belanja Pegawai		
2	1	3	1	7		Tunjangan BPD		
2	1	3	1	7	1	Tunjangan Ketua BPD		
2	1	3	1	7	2	Tunjangan Sekretaris BPD		
2	1	3	1	7	3	Tunjangan Anggota BPD		
2	1	3	1	8		Uang Sidang BPD		
2	1	3	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	1	3	2	1		Belanja Bahan		
2	1	3	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor		
2	1	3	2	1	2	Belanja Perlengkapan Kantor		
2	1	3	2	1	3	Belanja Peralatan kantor		
2	1	3	2	4		Belanja cetak dan penggandaan		
2	1	3	2	4	1	Belanja pengadaan		
2	1	3	2	4	2	Belanja cetak dan jilid		
2	1	3	2	7		Belanja makan dan minum		
2	1	3	2	7	1	Belanja makan dan minum rapat		
2	1	3	2	7	2	Belanja makan dan minum peninjauan		
2	1	3	2	7	3	Belanja makan dan minum tamu		
2	1	3	2	8		Belanja Pakaian Dinas		
2	1	3	2	8	1	Belanja Pakaian Dinas Ketua BPD		
2	1	3	2	8	2	Belanja Pakaian Dinas Sekretaris BPD		
2	1	3	2	8	3	Belanja Pakaian Dinas Anggota BPD		
2	1	4				Insentif RT/RW		
2	1	4	1			Belanja Pegawai		
2	1	4	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	1	5				Kegiatan pembayaran tunjangan masa		

						akhir jabatan kepala desa dan perangkat desa		
2	1	5	1			Belanja Pegawai		
2	1	5	1	3		Tunjangan Akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	5	1	3	1	Tunjangan Akhir masa jabatan Kepala Desa		
2	1	5	1	3	2	Tunjangan Akhir masa jabatan Perangkat Desa		
2	1	6				Kegiatan Insesifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
2	1	6	1			Belanja Pegawai		
2	1	6	1	9		Honorarium Kegiatan		
2	1	6	1	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	6	1	2	15	Pembayaran PBB		
2	1	7				Kegiatandst		
2	1	7	1			Belanja Pegawai		
2	1	7	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	1	7	3			Belanja Modal		
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	2	1				Kegiatan.....		
2	2	1	1			Belanja Pegawai		
2	2	1	1	9		Honorarium Kegiatan		
2	2	1	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	2	1	2	1		Belanja Bahan		
2	2	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor		
2	2	1	2	11		Upah Tenaga Kerja		
2	2	1	2	12		Honorarium Narasumber/Ahli		
2	2	1	2	5		Sewa Alat Berat		
2	2	1	2	5	1	Belanja Sewa alat berat eskavator		
2	2	1	2	5	2	Belanja sewa motor greader		
2	2	1	2	5	3	Belanja sewa alat lain		
2	2	1	3			Belanja Modal		
2	2	1	3	3		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi		
2	2	1	3	3	1	Belanja modal jalan desa/usaha tani		
2	2	1	3	3	2	Belanja modal jembatan		
2	2	1	3	3	3	Belanja modal Drainase		
2	2	1	3	3	4	Belanja modal gorong-gorong		
2	2	1	3	3	5	Belanja modal talud jalan		
2	2	1	3	4		Belanja modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi		
2	2	1	3	4	1	Belanja modal dam/bendungan		
2	2	1	3	4	2	Belanja Modal irigasi tersier		
2	2	1	3	4	3	Belanja modal bangunan gedung pertanian/embung desa		

2	2	1	3	4	4	Belanja modal peralatan pertanian		
2	2	1	2	5		Belanja modal pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian		
2	2	1	3	5	1	Belanja modal pasar desa		
2	2	1	3	5	2	Belanja pendirian dan pengembangan BUM Desa;		
2	2	1	3	5	3	Belanja modal pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;		
2	2	1	3	5	4	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;		
2	2	1	3	5	5	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;		
2	2	1	3	5	6	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;		
2	2	1	3	5	7	Belanja modal pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu		
2	2	1	3	5	8	Belanja Modal pengembangan Desa Wisata;		
2	2	1	3	6		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan		
2	2	1	3	6	1	Belanja modal gedung kegiatan pendidikan		
2	2	1	3	6	2	Belanja modal bahan alat ajar pendidikan		
2	2	1	3	6	2	Belanja modal peralatan pendidikan		
2	2	1	3	7		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana sosial/keagamaan		
2	2	1	3	7	1	Belanja pembanguna tempat ibadah		
2	2	1	3	8		Belanja modal sarana dan prasarana kesehatan		
2	2	1	3	8	1	Belanja modal bangunan untuk kesehatan		
2	2	1	3	8	2	Belanja modal bahan untuk kesehatan		
2	2	1	3	8	3	Belanja modal untuk alat kesehatan		
2	2	2				Kegiatan..... dst		
2	2	2	1			Belanja Pegawai		
2	2	2	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	2	2	3			Belanja modal		
2	3					BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
2	3	1				Kegiatan.....		
2	3	1	1			Belanja pegawai		

2	3	1	1	9		Honorarium kegiatan		
2	3	1	2			Belanja Barang dan jasa		
2	3	1	2	1		Belanja bahan		
2	3	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor		
2	3	1	2	11		Upah tenaga kerja		
2	3	1	2	12		Honorarium narasumber/ahli		
2	3	1	2	13		Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
2	3	1	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
2	3	1	2	14	1	Uang penghargaan/operasional		
						- Lembaga pendidikan		
						- Lembaga kesehatan		
						- Lembaga ekonomi		
						- Lembaga sosial dan budaya		
						- Lembaga keagamaan		
						- Lembaga kemasyarakatan desa		
2	3	2				Kegiatan.....dst		
2	3	2	1			Belanja pegawai		
2	3	2	2			Belanja barang dan jasa		
2	4					Bidang pemberdayaan masyarakat		
2	4	1				Kegiatan		
2	4	1	1			Belanja pegawai		
2	4	1	1	9		Honorarium narasumber/ahli		
2	4	1	2			Belanja barang dan jasa		
2	4	1	2	1		Belanja bahan		
2	4	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor		
2	4	1	2	11		Upah tenaga kerja		
2	4	1	2	12		Honorarium narasumber/ahli		
2	4	1	2	13		Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
2	4	1	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat		
2	4	1	2	14	2	Beasiswa, santunan/bantuan		
						- kelompok usaha ekonomi produktif;		
						- kelompok perempuan;		
						- kelompok tani;		
						- kelompok masyarakat miskin;		
						- kelompok nelayan;		
						- kelompok pengrajin;		
						- kelompok pemerhati dan perlindungan anak;		
						- kelompok pemuda;		
						- orang terlantar		
						- masyarakat berprestasi		
2	4	2				Kegiatan		
2	4	2	1			Belanja pegawai		

2	4	2	2			Belanja barang dan jasa		
2	5					BIDANG TAK TERDUGA		
						JUMLAH BELANJA		
						SURPLUS/DEFISIT		
3						PEMBIAYAAN		
3	1					<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1				SILPA		
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan		
3	i	3				Hasil KekayaanDesaYangdipisahkan		
						JUMLAH (RP)		
3	2					<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1				Perabentukan Dana Cadangan		
3	2	2				Penyertaan Modal Desa		
						JUMLAH (RP)		

Tanggal

KEPALA DESA

.....

TTD

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

KECAMATAN

PEMERINTAH DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBDes, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBDes tahun anggaran
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 111);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan Proses Kebijakan Publik di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran setelah perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula

Rp.....

b. Bertambah/ berkurang

Rp.....

Jumlah pendapatan desa setelah perubahan

Rp.....

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/ berkurang Rp.....

Jumlah bidang penyelenggaraan pemerintahan

setelah perubahan Rp.....

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/ berkurang Rp.....

Jumlah bidang pembangunan

desa setelah perubahan Rp.....

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/ berkurang Rp.....

Jumlah bidang pembinaan kemasyarakatan

setelah perubahan Rp.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/ berkurang Rp.....

Jumlah bidang pemberdayaan

Masyarakat setelah perubahan Rp.....

e. Bidang Tidak Terduga

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/ berkurang Rp.....

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp.....

Jumlah Belanja Desa

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/ berkurang Rp.....

Jumlah belanja desa setelah

perubahan Rp.....

Surplus/Defisit

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/ berkurang Rp.....

Jumlah surplus/defisit setelah

perubahan Rp.....

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/ berkurang Rp.....

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp.....

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/ berkurang Rp.....

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp.....

Jumlah Pembiayaan setelah perubahan Rp.....

Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a – b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran PeraturanDesa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan KepalaDesa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa.....
pada tanggal
KEPALA DESA

tanda tangan
(NAMA)

Diundangkan di Desa
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

Tanda tangan

(NAMA)
LEMBARAN DESA..... TAHUNNOMOR

Lampiran Peraturan Desa
Nomor :.....
Tahun :.....
Tentang :.....

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

URAIAN						ANGGARAN (Rp.)		BERTA MBAH / BERKU RANG (+/-)	PROSE NTASE (%)
						SEBEL UM PERUB AHAN (Rp.)	SETEL AH PERUB AHAN (Rp)		
1						2	3	4	5
1						PENDAPATAN			
1	1					Pendapatan Asli Desa			
1	1	1				Hasil Usaha			
1	1	1	1			Hasil Laba Bumdes			
1	1	2				Hasil Aset Desa			
1	1	2	1			Tanah Desa			
1	1	2	2			Bandes			
1	1	2	3			Pasar desa			
1	1	2	4			Pasar Hewan			
1	1	2	5			Bangunan Desa			
1	1	2	5	1		Kios Desa			
1	1	2	5	2		Gedung Pertemuan Desa			
1	1	2	5	3		Gedung Olah Raga			
1	1	2	5	4		Bangunan Desa Lainnya			
1	1	2	6			Hutan Milik Desa			
1	1	2	7			Mata Air Milik Desa			
1	1	2	8			Pemandian Umum			
1	1	2	9			Obyek Rekreasi Desa			
1	1	2	10			Lapangan Desa			
1	1	2	11			Aset Desa Lainnya			
1	1	3				Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
1	1	3	1			Swadaya dan Partisipasi			
1	1	3	2			Gotong Royong			
1	1	4				Lain-lain Pendapatan			

						Asli Desa				
1	1	4	1			Pungutan Desa				
1	1	4	2			Hasil Penjualan Kekayaan selain Tanah yang dipisahkan				
1	1	4	3			Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun berjalan				
1	1	4	4			Bunga Simpanan Uang di Bank				
1	2					Pendapatan Transfer				
1	2	1				Dana Desa				
1	2	2				Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
1	2	3				Alokasi Dana Desa				
1	2	4				Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				
1	2	5				Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten				
1	3					Pendapatan Lain-lain				
1	3	1				Hiba dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat				
1	3	2				Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah				
1	3	2	1			Hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga				
1	3	2	2			Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa				
						Jumlah Pendapatan				
2						BELANJA DESA				
2	1					BIDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
2	1	1				Pembayaran Penghasilan tetpa Kepala Desa dan perangkat desa				
2	1	1	1			Belanja Pegawai				
2	1	1	1	1		Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa				
2	1	1	1	1	1	Penghasilan tetap kepala desa				
2	1	1	1	1	2	Penghasilan tetap perangkat desa				
2	1	1	1	2		Penghasilan Staf Pemerintah Desa				
2	1	1	1	5		Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	5	1	Tunjangan Kepala Desa				
						- Tunjang Kesehatan				
						- Tunjangan				

							Kecelakaan				
							- Tunjangan Kematian				
							- Tunjangan lain-lain				
2	1	1	1	5	2		Tunjangan Perangkat Desa				
							- Tunjang Kesehatan				
							- Tunjangan Kecelakaan				
							- Tunjangan Kematian				
							- Tunjangan lain-lain				
2	1	1	1	6			Tunjangan pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	6	1		Tunjangan pejabat Kepala				
2	1	1	1	6	2		Tunjangan Perangkat Desa				
2	1	2					Operasional perkantoran desa				
2	1	2	1				Belanja Pegawai				
2	1	2	1	10			Operasional Kepala desa dan perangkat desa				
2	1	2	1	10	1		Operasional Kepala Desa				
2	1	2	1	10	2		Operasional Perangkat Desa				
2	1	1	1	11			Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan				
2	1	1	1	11	1		Tunjangan Bendahara				
2	1	1	1	11	2		Tunjangan Pembantu Bendahara				
2	1	1	1	11	3		Tunjangan Pengurus Barang				
2	1	1	1	11	4		Tunjangan Pembantu Pengurus Barang				
2	1	2	2				Belanja Barang dan jasa				
2	1	2	2	1			Belanja bahan				
2	1	2	2	1	1		Belanja alat tulis kantor				
2	1	2	2	1	2		Belanja perlengkapan kantor				
2	1	2	2	1	3		Belanja Perlatan kantor				
2	1	2	2	2			Belanja jasa kantor				
2	1	2	2	2	1		Belanja telepon				
2	1	2	2	2	2		Belanja air				
2	1	2	2	2	3		Belanja listrik				
2	1	2	2	2	4		Belanja surat kabar/majalah				
2	1	2	2	2	5		Belanja perangko/materai				
2	1	2	2	2	6		Belanja alat kebersihan				
2	1	2	2	2	7		Belanja langganan				

						internet				
2	1	2	2	2	8	Belanja lain-lain				
2	1	2	2	3		Belanja Pemeliharaan				
2	1	2	2	3	1	Belanja pemeliharaan bangunan desa				
2	1	2	2	3	2	Belanja pemeliharaan peralatan kantor				
2	1	2	2	3	3	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor				
2	1	2	2	3	4	Belanja pemeliharaan computer				
2	1	2	2	3	5	Belanja pemeliharaan Kendaraan dinas				
2	1	2	2	3	6	Belanja pemeliharaan taman				
2	1	2	2	3	7	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi				
2	1	2	2	3	8	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana produksi				
2	1	2	2	3	9	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian				
2	1	2	2	3	10	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana sosial/keagamaan				
2	1	2	2	3	11	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan				
2	1	2	2	3	12	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan				
2	1	2	2	3	13	Belanja pemeliharaan lainnya				
2	1	2	2	4		Belanja cetak dan penggandaan				
2	1	2	2	4	1	Belanja pengadaan				
2	1	2	2	4	2	Belanja cetak dan jilid				
2	1	2	2	6		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
2	1	2	2	6	1	Belanja sewa meja dan kursi				
2	1	2	2	6	2	Belanja sewa tenda				
2	1	2	2	6	3	Belanja sewa soundsystem				
2	1	2	2	7		Belanja makan dan minum				
2	1	2	2	7	1	Belanja makan dan minum rapat				
2	1	2	2	7	2	Belanja makan dan minum peninjauan				

2	1	2	2	7	3	Belanja makan dan minum tamu				
2	1	2	2	8		Belanja pakaian dinas				
2	1	2	2	8	1	Belanja pakaian dinas Kepala Desa				
2	1	2	2	8	2	Belanja pakaian dinas Perangkat Desa				
2	1	2	2	8	3	Belanja Pakaian Lainnya				
2	1	2	2	9		Belanja Perjalanan dinas				
2	1	2	2	9	1	Belanja Perjalanan dinas Dalam daerah				
2	1	2	2	9	2	Belanja Perjalanan dinas luar daerah				
2	1	2	2	10		Belanja Bahan bakar minyak				
2	1	2	2	10	1	Upah Tenaga Kerja				
2	1	2	2	10	2	Honorarium narasumber/ahli				
2	1	2	3			Belanja Modal				
2	1	2	3	1		Belanja Modal Tanah				
2	1	2	3	1	1	Belanja Modal Tanah				
2	1	2	3	2		Belanja modal sarana dan prasarana perkantoran				
2	1	2	3	2	1	Belanja printer/computer				
2	1	2	3	2	2	Belanja Meja Kursi				
2	1	2	3	2	3	Belanja lemari				
2	1	2	3	2	4	Belanja filling cabinet				
2	1	2	3	2	5	Belanja rak arsip				
2	1	2	3	2	6	Belanja moda' gedung kantor				
2	1	2	3	2	7	Belanja kendaraan dinas				
2	1	3				Pembayaran Tunjangan BPD dan Operasional BPD				
2	1	3	1			Belanja Pegawai				
2	1	3	1	7		Tunjangan BPD				
2	1	3	1	7	1	Tunjangan Ketua BPD				
2	1	3	1	7	2	Tunjangan Sekretaris BPD				
2	1	3	1	7	3	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	3	1	8		Uang Sidang BPD				
2	1	3	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	3	2	1		Belanja Bahan				
2	1	3	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor				

2	1	3	2	1	2	Belanja Perlengkapan Kantor					
2	1	3	2	1	3	Belanja Peralatan kantor					
2	1	3	2	4		Belanja cetak dan penggandaan					
2	1	3	2	4	1	Belanja pengadaan					
2	1	3	2	4	2	Belanja cetak dan jilid					
2	1	3	2	7		Belanja makan dan minum					
2	1	3	2	7	1	Belanja makan dan minum rapat					
2	1	3	2	7	2	Belanja makan dan minum peninjauan					
2	1	3	2	7	3	Belanja makan dan minum tamu					
2	1	3	2	8		Belanja Pakaian Dinas					
2	1	3	2	8	1	Belanja Pakain Dinas Ketua BPD					
2	1	3	2	8	2	Belanja Pakain Dinas Sekretaris BPD					
2	1	3	2	8	3	Belanja Pakaian Dinas Anggota BPD					
2	1	4				Pembayaran Insentif RT/KW					
2	1	4	1			Belanja Pegawai					
2	1	4	2			Belanja Barang dan Jasa					
2	1	5				Kegiatan pembayaran tunjangan masa akhir jabatan kepala desa dan perangkat desa					
2	1	5	1			Belanja Pegawai					
2	1	5	1	3		Tunjangan Akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa					
2	1	5	1	3	1	Tunjangan Akhir masa jabatan Kepala Desa					
2	1	5	1	3	2	Tunjangan Akhir masa jabatan Perangkat Desa					
2	1	6				Kegiatan Insesifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
2	1	6	1			Belanja Pegawai					
2	1	6	1	9		Honorarium Kegiatan					
2	1	6	1	2		Belanja Barang dan Jasa					
2	1	6	1	2	15	Pembayaran PBB					
2	1	7				Kegiatan					
2	1	7	1			Belanja Pegawai					

2	1	7	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	7	3			Belanja Modal				
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2	2	1				Kegiatan.....				
2	2	1	1			Belanja Pegawai				
2	2	1	1	9		Honorarium Kegiatan				
2	2	1	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	2	1	2	1		Belanja Bahar				
2	2	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor				
2	2	1	2	11		Upah Tenaga Kerja				
2	2	1	2	12		Honorarium Narasumber/Ahli				
2	2	1	2	.		Sewa Alat Berat				
2	2	1	2	5	1	Belanja Sewa alat berat eskavator				
2	2	1	2	5	2	Belanja sewa motor greader				
2	2	1	2	5	3	Belanja sewa alat lain				
2	2	1	3			Belanja Modal				
2	2	1	3	3		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi				
2	2	1	3	3	1	Belanja modal jalan desa/usaha tani				
2	2	1	3	3	2	Belanja modal jembatan				
2	2	1	3	3	3	Belanja modal Drainase				
2	2	1	3	3	4	Belanja modal gorong- gorong				
2	2	1	3	3	5	Belanja modal talud jalan				
2	2	1	3	4		Belanja modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi				
2	2	1	3	4	1	Belanja modal dam/bendungan				
2	2	1	3	4	2	Belanja Modal irigasi tersier				
2	2	1	3	4	3	Belanja modal bangunan gedung pertanian/embung desa				
2	2	1	3	4	4	Belanja modal peralatan pertanian				
2	2	1	2	5		Belanja modal pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian				
2	2	1	3	5	1	Belanja modal pasar				

						desa					
2	2	1	3	5	2	Belanja pendirian dan pengembangan BUM Desa;					
2	2	1	3	5	3	Belanja modal pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;					
2	2	1	3	5	4	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;					
2	2	1	3	5	5	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;					
2	2	1	3	5	6	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;					
2	2	1	3	5	7	Belanja modal pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu					
2	2	1	3	5	8	Belanja Modal pengembangan Desa Wisata;					
2	2	1	3	6		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan					
2	2	1	3	6	1	Belanja modal gedung kegiatan pendidikan					
2	2	1	3	6	2	Belanja modal bahan alat ajar pendidikan					
2	2	1	3	6	2	Belanja modal peralatan pendidikan					
2	2	1	3	7		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana sosial/keagamaan					
2	2	1	3	7	1	Belanja pembanguna tempat ibadah					
2	2	1	3	8		Belanja moda' sarana dan prasarana kesehatan					
2	2	1	3	8	1	Belanja modal bangunan untuk kesehatan					
2	2	1	3	8	2	Belanja modal bahan untuk kesehatan					
2	2	1	3	8	3	Belanja modal untuk alat kesehatan					

							Kegiatan.....dst					
2	2	2					Belanja Pegawai					
2	2	2	2				Belanja Barang dan Jasa					
2	2	2	3				Belanja modal					
2	3						BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2	3	1					Kegiatan.....					
2	3	1	1				Belanja pegawai					
2	3	1	1	9			Honorarium kegiatan					
2	3	1	2				Belanja Barang dan jasa					
2	3	1	2	1			Belanja bahan					
2	3	1	2	1	1		Belanja alat tulis kantor					
2	3	1	2	11			Upah tenaga kerja					
2	3	1	2	12			Honorarium narasumber/ahli					
2	3	1	2	13			Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat					
2	3	1	2	14			Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat					
2	3	1	2	14	1		Uang penghargaan/operasiona l					
							- Lembaga pendidikan					
							- Lembaga kesehatan					
							- Lembaga ekonomi					
							- Lembaga sosial dan budaya					
							- Lembaga keagamaan					
							- Lembaga kemasyarakatan desa					
2	3	2					Kegiatan.....dst					
2	3	2	1				Belanja pegawai					
2	3	2	2				Belanja barang dan jasa					
2	4						Bidang pemberdayaan masyarakat					
2	4	1					Kegiatan					
2	4	1	1				Belanja pegawai					
2	4	1	1	9			Honorarium narasumber/ahli					
2	4	1	2				Belanja barang dan jasa					
2	4	1	2	1			Belanja bahan					
2	4	1	2	1	1		Belanja alat tulis kantor					
2	4	1	2	11			Upah tenaga kkerja					

2	4	1	2	12		Honorarium narasumber/ahli				
2	4	1	2	13		Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
2	4	1	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
2	4	1	2	14	2	Beasiswa, santunan/bantuan				
						- kelompok usaha ekonomi produktif;				
						- kelompok perempuan;				
						- kelompok tani;				
						- kelompok masyarakat miskin;				
						- kelompok nelayan;				
						- kelompok pengrajin;				
						- kelompok pemerhati dan perlindungan anak;				
						- kelompok pemuda;				
						- orang terlantar				
						- masyarakat berprestasi				
2	4	2				Kegiatan				
2	4	2	1			Belanja pegawai				
2	4	2	2			Belanja barang dan jasa				
2	5					BIDANG TAK TERDUGA				
						JUMLAH BELANJA				
						SURPLUS/DEFISIT				
3						PEMBIAYAAN				
3	1					Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1				SILPA				
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3				Hasil KekayaanDesaYangdipisa hkan				
						JUMLAH (RP)				
3	2					Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2				Penyertaan Modal Desa				
						JUMLAH (RP)				

Tanggal
KEPALA DESA

TTD
(.....)

III. RAB DAN BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

A. RAB

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian :

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
- 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- 7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

B. BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :
 2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa.....

.....,Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

IV. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA, KWITANSI, NOTA PESANAN, BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG, DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG.

A. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

Telah dibayar lunas
Bendahara

Petunjuk pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
- 3. Kolom 1 dengan nomor urut.
- 4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
- 5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
- 6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
- 7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
- 8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
- 9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

B. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir,
untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,tanggal
.....
Pelaksana Kegiatan
.....

Cara
pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
- 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
- 5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
- 6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
- 7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

C. KWITANSI

DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN BOALEMO

KWITANSI TANDA TERIMA

Sudah Terima

Dari : Bendahara Pengeluaran Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo

*Sejumlah
Uang*

: 

Yakni

: Pembayaran

Terbilang Rp

: 

..... **201...**

Pelaksana Kegiatan

Bendahara

Yang
Menerima

.....

.....

.....

Mengetahui,
KEPALA DESA SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN

.....

D. SURAT PESANAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

KECAMATAN

DESA.....

SURAT PESANAN

NO.

Kepada Yth.

Harap dalam waktu singkat dapat memasukkan barang/alat sebagai pesanan
Pemerintah Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Boalemo sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
J U M L A H					
Sudah Termasuk Pajak					
Terbilang :					

Pelaksana Kegiatan

.....
Bendahara Penyimpan Barang

.....
Mengetahui,
Kepala Desa.....

.....

E. BERTA ACARA PEMERIKSAAN BARANG



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

KECAMATAN

DESA.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / JASA

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
..... bertempat di Desa..... berdasarkan Keputusan
Kepala DesaKecamatan Kabupaten Boalemo, Nomor
.....Tanggal Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jabatan : Ketua

Nama : Jabatan : Sekretaris

Nama : Jabatan : Anggota

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan yang dipesan dari:

Nama :

Alamat :

Sebagai Realisasi Nota Pesanan Nomor :

1.

Hasil Pemeriksaan dinyatakan :

a) Baik

b) Kurang/tidak baik

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa pada penyimpan barang dan/atau pengurus barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap II (Dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang Jasa

Panitia Pemeriksa Barang/Jasa

1. Nama:.....

Tandatangan: (.....)

2.Nama :

Tandatangan: (.....)

3. Nama:

Tanda Tangan : (.....)

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

NO.	NAMA BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
1.					
J U M L A H					
Sudah Termasuk Pajak					
Terbilang :					

Penyedia Barang Jasa

.....

Panitia Pemeriksa Barang/Jasa

1. Nama:
Tandatangan: (.....)

2.Nama :
Tandatangan: (.....)

3. Nama:
Tanda Tangan : (.....)

F. BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

KECAMATAN

DESA.....

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG / JASA

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Desa , Pemerintah Desa
..... Kecamatan Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa....., Nomor Tanggal
..... Tahun, telah menerima barang yang diserahkan oleh
Rekanan penyedia barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa Barang Bulan
.....Tahun, sebagaimana daftar terlampir.

Daftar barang yang diterima sebagai berikut :

1.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap II (dua) untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan

Yang menerima
Penyimpan dan Pengurus BMD

LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

NO	NAMA BARANG	BANYA KNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
J U M L A H					
Sudah Termasuk Pajak					
Terbilang :					

Yang Menyerahkan

.....
Yang menerima
Penyimpan dan Pengurus BMD

V. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes

A. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES SEMESTER
PERTAMA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING						URAIAN	JUMLA H ANGGA RAN (Rp.)	JUMLA H REALIS ASI (Rp)	LEBIH KURAN G	KET
1						2	3	4	5	6
1						PENDAPATAN				
1	1					Pendapatan Asli Desa				
1	1	1				Hasil Usaha				
1	1	1	1			Hasil Laba Bumdes				
1	1	2				Hasil Aset Desa				
1	1	2	1			Tanah Desa				
1	1	2	2			Bandes				
1	1	2	3			Pasar desa				
1	1	2	4			Pasar Hewan				
1	1	2	5			Bangunan Desa				
1	1	2	5	1		Kios Desa				
1	1	2	5	2		Gedung Pertemuan Desa				
1	1	2	5	3		Gedung Olah Raga				
1	1	2	5	4		Bangunan Desa Lainnya				
1	1	2	6			Hutan Milik Desa				
1	1	2	7			Mata Air Milik Desa				
1	1	2	8			Pemandian Umum				
1	1	2	9			Obyek Rekreasi Desa				
1	1	2	10			Lapangan Desa				
1	1	2	11			Aset Desa Lainnya				
1	1	3				Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3	1			Swadaya dan Partisipasi				
1	1	3	2			Gotong Royong				
1	1	4				Lain-lain Pendapatan Asli Desa				
1	1	4	1			Pungutan Desa				
1	1	4	2			Hasil Penjualan Kekayaan selain Tanah				

							yang dipisahkan						
1	1	4	3				Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun berjalan						
1	1	4	4				Bunga Simpanan Uang di Bank						
1	2						Pendapatan Transfer						
1	2	1					Dana Desa						
1	2	2					Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						
1	2	3					Alokasi Dana Desa						
1	2	4					Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi						
1	2	5					Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten						
1	3						Pendapatan Lain-lain						
1	3	1					Hiba dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat						
1	3	2					Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah						
1	3	2	1				Hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga						
1	3	2	2				Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa						
							Jumlah Pendapatan						
2							BELANJA DESA						
2	1						BIDANGAN						
							PENYELENGGARAAN						
							PEMERINTAHAN DESA						
2	1	1					Pembayaran Penghasilan tetpa Kepala Desa dan perangkat desa						
2	1	1	1				Belanja Pegawai						
2	1	1	1	1			Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa						
2	1	1	1	1	1		Penghasilan tetap kepala desa						
2	1	1	1	1	2		Penghasilan tetap perangkat desa						
2	1	1	1	2			Penghasilan Staf Pemerintah Desa						
2	1	1	1	5			Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa						
2	1	1	1	5	1		Tunjangan Kepala Desa						
							- Tunjang Kesehatan						
							- Tunjangan Kecelakaan						
							- Tunjangan Kematian						

						- Tunjangan lain-lain				
2	1	1	1	5	2	Tunjangan Perangkat Desa				
						- Tunjang Kesehatan				
						- Tunjangan Kecelakaan				
						- Tunjangan Kematian				
						- Tunjangan lain-lain				
2	1	1	1	6		Tunjangan penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	6	1	Tunjangan penjabat Kepala				
2	1	1	1	6	2	Tunjangan Perangkat Desa				
2	1	2				Operasional perkantoran desa				
2	1	2	1			Belanja Pegawai				
2	1	2	1	10		Operasional Kepala desa dan perangkat desa				
2	1	2	1	10	1	Operasional Kepala Desa				
2	1	2	1	10	2	Operasional Perangkat Desa				
2	1	1	1	11		Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan				
2	1	1	1	11	1	Tunjangan Bendahara				
2	1	1	1	11	2	Tunjangan Pembantu Bendahara				
2	1	1	1	11	3	Tunjangan Pengurus Barang				
2	1	1	1	11	4	Tunjangan Pembantu Pengurus Barang				
2	1	2	2			Belanja Barang dan jasa				
2	1	2	2	1		Belanja bahan				
2	1	2	2	1	1	Belanja alat tulis kantor				
2	1	2	2	1	2	Belanja perlengkapan kantor				
2	1	2	2	1	3	Belanja Perlatan kantor				
2	1	2	2	2		Belanja jasa kantor				
2	1	2	2	2	1	Belanja telepon				
2	1	2	2	2	2	Belanja air				
2	1	2	2	2	3	Belanja listrik				
2	1	2	2	2	4	Belanja surat kabar/majalah				
2	1	2	2	2	5	Belanja perangko/materai				
2	1	2	2	2	6	Belanja alat kebersihan				
2	1	2	2	2	7	Belanja langganan				

						internet				
2	1	2	2	2	8	Belanja lain-lain				
2	1	2	2	3		BelanjaPemeliharaan				
2	1	2	2	3	1	Belanja pemeliharaan bangunan desa				
2	1	2	2	3	2	Belanja pemeliharaan peralatan kantor				
2	1	2	2	3	3	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor				
2	1	2	2	3	4	Belanja pemeliharaan komputer				
2	1	2	2	3	5	Belanja pemeliharaan Kendaraan dinas				
2	1	2	2	3	6	Belanja pemeliharaan taman				
2	1	2	2	3	7	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi				
2	1	2	2	3	8	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana produksi				
2	1	2	2	3	9	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian				
2	1	2	2	3	10	Belanja pemeliharaan sarana dan prasaranan sosil/keagamaan				
2	1	2	2	3	11	Belanja pemeliharaan saranan dan prasana pendidikan				
2	1	2	2	3	12	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan				
2	1	2	2	3	13	Belanja pemeliharaan lainnya				
2	1	2	2	4		Belanja cetak dan penggandaan				
2	1	2	2	4	1	Belanja pengadaan				
2	1	2	2	4	2	Belanja cetak dan jilid				
2	1	2	2	6		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
2	1	2	2	6	1	Belanja sewa meja dan kursi				
2	1	2	2	6	2	Belanja sewa tenda				
2	1	2	2	6	3	Belanja sewa soundsystem				
2	1	2	2	7		Belanja makan dan minum				
2	1	2	2	7	1	Belanja makan dan				

[illegible]

2	1	3	1	8		Uang Sidang BPD				
2	1	3	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	3	2	1		Belanja Bahan				
2	1	3	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor				
2	1	3	2	1	2	Belanja Perlengkapan Kantor				
2	1	3	2	1	3	Belanja Pera'atan kantor				
2	1	3	2	4		Belanja cetak dan penggandaan				
2	1	3	2	4	1	Belanja pengadaan				
2	1	3	2	4	2	Belanja cetak dan jilid				
2	1	3	2	7		Belanja makan dan minum				
2	1	3	2	7	1	Belanja makan dan minum rapat				
2	1	3	2	7	2	Belanja makan dan minum peninjauan				
2	1	3	2	7	3	Belanja makan dan minum tamu				
2	1	3	2	8		Belanja Pakaian Dinas				
2	1	3	2	8	1	Belanja Pakain Dinas Ketua BPD				
2	1	3	2	8	2	Belanja Pakain Dinas Sekretaris BPD				
2	1	3	2	8	3	Belanja Pakaian Dinas Anggota BPD				
2	1	4				Pembayaran Insentif Lembaga RT/R				
2	1	4	1			Belanja Pegawai				
2	1	4	1	9		Inentif R/RW				
2	1	4	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	5				Kegiatan pembayaran tunjangan masa akhir jabatan kepala desa dan perangkat desa				
2	1	5	1			Belanja Pegawai				
2	1	5	1	3		Tunjangan Akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	5	1	3	1	Tunjangan Akhir masa jabatan Kepala Desa				
2	1	5	1	3	2	Tunjangan Akhir masa jabatan Perangkat Desa				
2	1	6				Kegiatan Insesifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
2	1	6	1			Belanja Pegawai				

2	1	6	1	9		Honorarium Kegiatan				
2	1	6	1	2		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	6	1	2	15	Pembayaran PBB				
2	1	7				Kegiatandst				
2	1	7	1			Belanja Pegawai				
2	1	7	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	7	3			Belanja Modal				
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2	2	1				Kegiatan.....				
2	2	1	1			Belanja Pegawai				
2	2	1	1	9		Honorarium Kegiatan				
2	2	1	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	2	1	2	1		Belanja Bahan				
2	2	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor				
2	2	1	2	11		Upah Tenaga Kerja				
2	2	1	2	12		Honorarium Narasumber/Ahli				
2	2	1	2	5		Sewa Alat Berat				
2	2	1	2	5	1	Belanja Sewa alat berat eskavator				
2	2	1	2	5	2	Belanja sewa motor greader				
2	2	1	2	5	3	Belanja sewa alat lain				
2	2	1	3			Belanja Modal				
2	2	1	3	3		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi				
2	2	1	3	3	1	Belanja modal jalan desa/usaha tani				
2	2	1	3	3	2	Belanja modal jembatan				
2	2	1	3	3	3	Belanja modal Drainase				
2	2	1	3	3	4	Belanja modal gorong- gorong				
2	2	1	3	3	5	Belanja modal talud jalan				
2	2	1	3	4		Belanja modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi				
2	2	1	3	4	1	Belanja modal dam/bendungan				
2	2	1	3	4	2	Belanja Modal irigasi tersier				
2	2	1	3	4	3	Belanja modal bangunan gedung				

						pertanian/embung desa				
2	2	1	3	4	4	Belanja modal peralatan pertanian				
2	2	1	2	5		Belanja modal pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian				
2	2	1	3	5	1	Belanja modal pasar desa				
2	2	1	3	5	2	Belanja pendirian dan pengembangan BUM Desa;				
2	2	1	3	5	3	Belanja modal pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;				
2	2	1	3	5	4	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;				
2	2	1	3	5	5	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;				
2	2	1	3	5	6	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;				
2	2	1	3	5	7	Belanja modal pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu				
2	2	1	3	5	8	Belanja Modal pengembangan Desa Wisata;				
2	2	1	3	6		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.				
2	2	1	3	6	1	Belanja modal gedung kegiatan pendidikan				
2	2	1	3	6	2	Belanja modal bahan alat ajar pendidikan				
2	2	1	3	6	2	Belanja modal peralatan pendidikan				
2	2	1	3	7		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana sosial/ keagamaan				

IV. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA, KWITANSI, NOTA PESANAN, BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG, DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG.

A. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

Telah dibayar lunas
Bendahara

.....

.....

- Petunjuk pengisian:
- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
 - 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
 - 3. Kolom 1 dengan nomor urut.
 - 4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
 - 5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
 - 6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
 - 7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
 - 8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
 - 9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

B. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :

2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,tanggal

.....

Pelaksana Kegiatan

.....

Cara

pengisian:


1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

C. KWITANSI

DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN BOALEMO

KWITANSI TANDA TERIMA

Sudah Terima
Dari : Bendahara Pengeluaran Kantor Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Boalemo

Sejumlah
Uang : 

Yakni : Pembayaran

Terbilang Rp : 

..... 201...

Pelaksana Kegiatan	Bendahara	Yang Menerima
.....

Mengetahui,
KEPALA DESA SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN

.....

D. SURAT PESANAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

KECAMATAN

DESA.....

SURAT PESANAN

NO.

Kepada Yth.

Harap dalam waktu singkat dapat memasukkan barang/alat sebagai pesanan
Pemerintah Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Boalemo sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
J U M L A H					
Sudah Termasuk Pajak					
Terbilang :					

Pelaksana Kegiatan

.....
Bendahara Penyimpan Barang

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Desa.....

.....

E. BERTA ACARA PEMERIKSAAN BARANG



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

KECAMATAN

DESA.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / JASA

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
..... bertempat di Desa..... berdasarkan Keputusan
Kepala DesaKecamatan Kabupaten Boalemo, Nomor
.....Tanggal Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jabatan : Ketua
Nama : Jabatan : Sekretaris
Nama : Jabatan : Anggota

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan yang
dipesan dari:

Nama :

Alamat :

Sebagai Realisasi Nota Pesanan Nomor :

1.

Hasil Pemeriksaan dinyatakan :

- a) Baik
- b) Kurang/tidak baik

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa pada penyimpan barang
dan/atau pengurus barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap II (Dua) untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang Jasa

Panitia Pemeriksa Barang/Jasa

1. Nama:.....

Tandatangan: (.....)

2.Nama :

Tandatangan: (.....)

3. Nama:

Tanda Tangan : (.....)

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

NO.	NAMA BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
1.					
J U M L A H					
Sudah Termasuk Pajak					
Terbilang :					

Penyedia Barang Jasa

.....

Panitia Pemeriksa Barang/Jasa

1. Nama:
Tandatangan: (.....)

2.Nama :
Tandatangan: (.....)

3. Nama:
Tanda Tangan : (.....)

F. BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

KECAMATAN

DESA.....

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG / JASA

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Desa , Pemerintah Desa
..... Kecamatan Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa....., Nomor Tanggal
..... Tahun, telah menerima barang yang diserahkan oleh
Rekanan penyedia barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bulan
.....Tahun, sebagaimana daftar terlampir.

Daftar barang yang diterima sebagai berikut :

1.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap II (dua) untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan

Yang menerima
Penyimpan dan Pengurus BMD

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

NO	NAMA BARANG	BANYA KNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
J U M L A H					
Sudah Termasuk Pajak					
Terbilang :					

Yang Menyerahkan

.....
Yang menerima
Penyimpan dan Pengurus BMD

V. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes

A. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES SEMESTER
PERTAMA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING						URAIAN	JUMLA H ANGGA RAN (Rp.)	JUMLA H REALIS ASI (Rp)	LEBIH KURAN G	KET
1						2	3	4	5	6
1						PENDAPATAN				
1	1					Pendapatan Asli Desa				
1	1	1				Hasil Usaha				
1	1	1	1			Hasil Laba Bumdes				
1	1	2				Hasil Aset Desa				
1	1	2	1			Tanah Desa				
1	1	2	2			Bandes				
1	1	2	3			Pasar desa				
1	1	2	4			Pasar Hewan				
1	1	2	5			Bangunan Desa				
1	1	2	5	1		Kios Desa				
1	1	2	5	2		Gedung Pertemuan Desa				
1	1	2	5	3		Gedung Olah Raga				
1	1	2	5	4		Bangunan Desa Lainnya				
1	1	2	6			Hutan Milik Desa				
1	1	2	7			Mata Air Milik Desa				
1	1	2	8			Pemandian Umum				
1	1	2	9			Obyek Rekreasi Desa				
1	1	2	10			Lapangan Desa				
1	1	2	11			Aset Desa Lainnya				
1	1	3				Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3	1			Swadaya dan Partisipasi				
1	1	3	2			Gotong Royong				
1	1	4				Lain-lain Pendapatan Asli Desa				
1	1	4	1			Pungutan Desa				
1	1	4	2			Hasil Penjualan Kekayaan selain Tanah				

							yang dipisahkan				
1	1	4	3				Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun berjalan				
1	1	4	4				Bunga Simpanan Uang di Bank				
1	2						Pendapatan Transfer				
1	2	1					Dana Desa				
1	2	2					Bagian dari Hasil Pajak Daerah dar. Retribusi Daerah				
1	2	3					Alokasi Dana Desa				
1	2	4					Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				
1	2	5					Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten				
1	3						Pendapatan Lain-lain				
1	3	1					Hiba dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat				
1	3	2					Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah				
1	3	2	1				Hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga				
1	3	2	2				Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa				
							Jumlah Pendapatan				
2							BELANJA DESA				
2	1						BIDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
2	1	1					Pembayaran Penghasilan tetpa Kepala Desa dan perangkat desa				
2	1	1	1				Belanja Pegawai				
2	1	1	1	1			Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa				
2	1	1	1	1	1		Penghasilan tetap kepala desa				
2	1	1	1	1	2		Penghasilan tetap perangkat desa				
2	1	1	1	2			Penghasilan Staf Pemerintah Desa				
2	1	1	1	5			Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	5	1		Tunjangan Kepala Desa				
							- Tunjang Kesehatan				
							- Tunjangan Kecelakaan				
							- Tunjangan Kematian				

						- Tunjangan lain-lain				
2	1	1	1	5	2	Tunjangan Perangkat Desa				
						- Tunjang Kesehatan				
						- Tunjangan Kecelakaan				
						- Tunjangan Kematian				
						- Tunjangan lain-lain				
2	1	1	1	6		Tunjangan penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	6	1	Tunjangan penjabat Kepala				
2	1	1	1	6	2	Tunjangan Perangkat Desa				
2	1	2				Operasional perkantoran desa				
2	1	2	1			Belanja Pegawai				
2	1	2	1	10		Operasional Kepala desa dan perangkat desa				
2	1	2	1	10	1	Operasional Kepala Desa				
2	1	2	1	10	2	Operasional Perangkat Desa				
2	1	1	1	11		Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan				
2	1	1	1	11	1	Tunjangan Bendahara				
2	1	1	1	11	2	Tunjangan Pembantu Bendahara				
2	1	1	1	11	3	Tunjangan Pengurus Barang				
2	1	1	1	11	4	Tunjangan Pembantu Pengurus Barang				
2	1	2	2			Belanja Barang dan jasa				
2	1	2	2	1		Belanja bahan				
2	1	2	2	1	1	Belanja alat tulis kantor				
2	1	2	2	1	2	Belanja perlengkapan kantor				
2	1	2	2	1	3	Blenaja Perlatan kantor				
2	1	2	2	2		Belanja jasa kantor				
2	1	2	2	2	1	Belanja telepon				
2	1	2	2	2	2	Belanja air				
2	1	2	2	2	3	Belanja listrik				
2	1	2	2	2	4	Belanja surat kabar/ majalah				
2	1	2	2	2	5	Belanja perangko/ materai				
2	1	2	2	2	6	Belanja alat kebersihan				
2	1	2	2	2	7	Belanja langganan				

						internet				
2	1	2	2	2	8	Belanja lain-lain				
2	1	2	2	3		BelanjaPemeliharaan				
2	1	2	2	3	1	Belanja pemeliharaan bangunan desa				
2	1	2	2	3	2	Belanja pemeliharaan peralatan kantor				
2	1	2	2	3	3	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor				
2	1	2	2	3	4	Belanja pemeliharaan komputer				
2	1	2	2	3	5	Belanja pemeliharaan Kendaraan dinas				
2	1	2	2	3	6	Belanja pemeliharaan taman				
2	1	2	2	3	7	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi				
2	1	2	2	3	8	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana produksi				
2	1	2	2	3	9	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian				
2	1	2	2	3	10	Belanja pemeliharaan sarana dan prasaranan sosil/keagamaan				
2	1	2	2	3	11	Belanja pemeliharaan saranan dan prasana pendidikan				
2	1	2	2	3	12	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan				
2	1	2	2	3	13	Belanja pemeliharaan lainnya				
2	1	2	2	4		Belanja cetak dan penggandaan				
2	1	2	2	4	1	Belanja pengadaan				
2	1	2	2	4	2	Belanja cetak dan jilid				
2	1	2	2	6		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
2	1	2	2	6	1	Belanja sewa meja dan kursi				
2	1	2	2	6	2	Belanja sewa tenda				
2	1	2	2	6	3	Belanja sewa soundsystem				
2	1	2	2	7		Belanja makan dan minum				
2	1	2	2	7	1	Belnaja makan dan				

						minum rapat				
2	1	2	2	7	2	Belanja makan dan minum peninjauan				
2	1	2	2	7	3	Belanja makan dan minum tamu				
2	1	2	2	8		Belanja pakaian dinas				
2	1	2	2	8	1	Belanja pakaian dinas Kepala Desa				
2	1	2	2	8	2	Belanja pakaian dinas Perangkat Desa				
2	1	2	2	8	3	Belanja Pakaian Lainnya				
2	1	2	2	9		Belanja Perjalanan dinas				
2	1	2	2	9	1	Belanja Perjalanan dinas Dalam daerah				
2	1	2	2	9	2	Belanja Perjalanan dinas luar daerah				
2	1	2	2	10		Belanja Bahan bakar minyak				
2	1	2	2	10	1	Upah Tenaga Kerja				
2	1	2	2	10	2	Honorarium narasumber/ahli				
2	1	2	3			Belanja Modal				
2	1	2	3	1		Belanja Modal Tanah				
2	1	2	3	1	1	Belanja Modal Tanah				
2	1	2	3	2		Belanja modal sarana dan prasarana perkantoran				
2	1	2	3	2	1	Belanja printer/computer				
2	1	2	3	2	2	Belanja Meja Kursi				
2	1	2	3	2	3	Belanja lemari				
2	1	2	3	2	4	Belanja filling cabinet				
2	1	2	3	2	5	Belanja rak arsip				
2	1	2	3	2	6	Belanja modal gedung kantor				
2	1	2	3	2	7	Belanja kendaraan dinas				
2	1	3				Pembayaran Tunjangan BPD dan Operasional BPD				
2	1	3	1			Belanja Pegawai				
2	1	3	1	7		Tunjangan BPD				
2	1	3	1	7	1	Tunjangan Ketua BPD				
2	1	3	1	7	2	Tunjangan Sekretaris BPD				
2	1	3	1	7	3	Tunjangan Anggota BPD				

2	1	3	1	8		Uang Sidang BPD				
2	1	3	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	3	2	1		Belanja Bahan				
2	1	3	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor				
2	1	3	2	1	2	Belanja Perlengkapan Kantor				
2	1	3	2	1	3	Belanja Peralatan kantor				
2	1	3	2	4		Belanja cetak dan penggandaan				
2	1	3	2	4	1	Belanja pengadaan				
2	1	3	2	4	2	Belanja cetak dan jilid				
2	1	3	2	7		Belanja makan dan minum				
2	1	3	2	7	1	Belanja makan dan minum rapat				
2	1	3	2	7	2	Belanja makan dan minum peninjauan				
2	1	3	2	7	3	Belanja makan dan minum tamu				
2	1	3	2	8		Belanja Pakaian Dinas				
2	1	3	2	8	1	Belanja Pakain Dinas Ketua BPD				
2	1	3	2	8	2	Belanja Pakain Dinas Sekretaris BPD				
2	1	3	2	8	3	Belanja Pakaian Dinas Anggota BPD				
2	1	4				Pembayaran Insentif Lembaga RT/R				
2	1	4	1			Belanja Pegawai				
2	1	4	1	9		Inentif R/RW				
2	1	4	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	5				Kegiatan pembayaran tunjangan masa akhir jabatan kepala desa dan perangkat desa				
2	1	5	1			Belanja Pegawai				
2	1	5	1	3		Tunjangan Akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	5	1	3	1	Tunjangan Akhir masa jabatan Kepala Desa				
2	1	5	1	3	2	Tunjangan Akhir masa jabatan Perangkat Desa				
2	1	6				Kegiatan Insesifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
2	1	6	1			Belanja Pegawai				

2	1	6	1	9		Honorarium Kegiatan				
2	1	6	1	2		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	6	1	2	15	Pembayaran PBB				
2	1	7				Kegiatandst				
2	1	7	1			Belanja Pegawai				
2	1	7	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	7	3			Belanja Modal				
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2	2	1				Kegiatan.....				
2	2	1	1			Belanja Pegawai				
2	2	1	1	9		Honorarium Kegiatan				
2	2	1	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	2	1	2	1		Belanja Bahan				
2	2	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor				
2	2	1	2	11		Upah Tenaga Kerja				
2	2	1	2	12		Honorarium Narasumber/Ahli				
2	2	1	2	5		Sewa Alat Berat				
2	2	1	2	5	1	Belanja Sewa alat berat eskavator				
2	2	1	2	5	2	Belanja sewa motor grader				
2	2	1	2	5	3	Belanja sewa alat lain				
2	2	1	3			Belanja Modal				
2	2	1	3	3		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi				
2	2	1	3	3	1	Belanja modal jalan desa/usaha tani				
2	2	1	3	3	2	Belanja modal jembatan				
2	2	1	3	3	3	Belanja modal Drainase				
2	2	1	3	3	4	Belanja modal gorong- gorong				
2	2	1	3	3	5	Belanja modal talud jalan				
2	2	1	3	4		Belanja modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi				
2	2	1	3	4	1	Belanja modal dam/bendungan				
2	2	1	3	4	2	Belanja Modal irigasi tersier				
2	2	1	3	4	3	Belanja modal bangunan gedung				

						pertanian/embung desa				
2	2	1	3	4	4	Belanja modal peralatan pertanian				
2	2	1	2	5		Belanja modal pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian				
2	2	1	3	5	1	Belanja modal pasar desa				
2	2	1	3	5	2	Belanja pendirian dan pengembangan BUM Desa;				
2	2	1	3	5	3	Belanja modal pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;				
2	2	1	3	5	4	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;				
2	2	1	3	5	5	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;				
2	2	1	3	5	6	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;				
2	2	1	3	5	7	Belanja modal pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu				
2	2	1	3	5	8	Belanja Modal pengembangan Desa Wisata;				
2	2	1	3	6		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan				
2	2	1	3	6	1	Belanja modal gedung kegiatan pendidikan				
2	2	1	3	6	2	Belanja modal bahan alat ajar pendidikan				
2	2	1	3	6	2	Belanja modal peralatan pendidikan				
2	2	1	3	7		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana sosial/keagamaan				

2	2	1	3	7	1	Belanja pembanguna tempat ibadah				
2	2	1	3	8		Belanja modal sarana dan prasarana kesehatan				
2	2	1	3	8	1	Belanja modal bangunan untuk kesehatan				
2	2	1	3	8	2	Belanja modal bahan untuk kesehatan				
2	2	1	3	8	3	Belanja modal untuk alat kesehatan				
2	2	2				Kegiatan..... dst				
2	2	2	1			Belanja Pegawai				
2	2	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	2	2	3			Belanja modal				
2	3					BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
2	3	1				Kegiatan.....				
2	3	1	1			Belanja pegawai				
2	3	1	1	9		Honorarium kegiatan				
2	3	1	2			Belanja Barang dan jasa				
2	3	1	2	1		Belanja bahan				
2	3	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor				
2	3	1	2	11		Upah tenaga kerja				
2	3	1	2	12		Honorarium narasumber/ahli				
2	3	1	2	13		Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
2	3	1	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
2	3	1	2	14	1	Uang penghargaan/operasional				
						- Lembaga pendidikan				
						- Lembaga kesehatan				
						- Lembaga ekonomi				
						- Lembaga sosial dan budaya				
						- Lembaga keagamaan				
						- Lembaga kemasyarakatan desa				
2	3	2				Kegiatan.....				
					dst				

2	3	2	1			Belanja pegawai				
2	3	2	2			Belanja barang dan jasa				
2	4					Bidang pemberdayaan masyarakat				
2	4	1				Kegiatan				
2	4	1	1			Belanja pegawai				
2	4	1	1	9		Honorarium narasumber/ahii				
2	4	1	2			Belanja barang dan jasa				
2	4	1	2	1		Belanja bahan				
2	4	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor				
2	4	1	2	11		Upah tenaga kkerja				
2	4	1	2	12		Hnorarium narasumber/ahli				
2	4	1	2	13		Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
2	4	1	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
2	4	1	2	14	2	Beasiswa, santunan/bantuan				
						- kelompok usaha ekonomi produktif;				
						- kelompok perempuan;				
						- kelompok tani;				
						- kelompok masyarakat miskin;				
						- kelompok nelayan;				
						- kelompok pengrajin;				
						- kelompok pemerhati dan perlindungan anak;				
						- kelompok pemuda;				
						- orang terlantar				
						- masyarakat berprestasi				
2	4	2				Kegiatan				
2	4	2	1			Belanja pegawai				
2	4	2	2			Belanja barang dan jasa				
2	5					BIDANG TAK TERDUGA				
						JUMLAH BELANJA				
						SURPLUS/DEFISIT				
3						PEMBIAYAAN				
3	1					Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1				SILPA				

3	1	2				Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3				Hasil KekayaanDesaYangdipisahkan				
						JUMLAH (RP)				
3	2					Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2				Penyertaan Modal Desa				
						JUMLAH (RP)				

Tanggal
KEPALA DESA

TTD
(.....)

B. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES SEMESTER
AKHIR TAHUN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING						URAIAN	JUMLA H ANGGA RAN (Rp.)	JUMLA H REALIS ASI (Rp)	LEBIH KURAN G	KET
1						2	3	4	5	6
1						PENDAPATAN				
1	1					<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1				Hasil Usaha				
1	1	1	1			Hasil Laba Bumdes				
1	1	2				Hasil Aset Desa				
1	1	2	1			Tanah Desa				
1	1	2	2			Bandes				
1	1	2	3			Pasar desa				
1	1	2	4			Pasar Hewan				
1	1	2	5			Bangunan Desa				
1	1	2	5	1		Kios Desa				
1	1	2	5	2		Gedung Pertemuan Desa				
1	1	2	5	3		Gedung Olah Raga				
1	1	2	5	4		Bangunan Desa Lainnya				
1	1	2	6			Hutan Milik Desa				
1	1	2	7			Mata Air Milik Desa				
1	1	2	8			Pemandian Umum				
1	1	2	9			Obyek Rekreasi Desa				
1	1	2	10			Lapangan Desa				
1	1	2	11			Aset Desa Lainnya				
1	1	3				Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3	1			Swadaya dan Partisipasi				
1	1	3	2			Gotong Royong				
1	1	4				Lain-lain Pendapatan Asli Desa				
1	1	4	1			Pungutan Desa				
1	1	4	2			Hasil Penjualan Kekayaan selain Tanah yang dipisahkan				
1	1	4	3			Hasil Pelepasan Tanah				

							Desa Tahun berjalan				
1	1	4	4				Bunga Simpanan Uang di Bank				
1	2						Pendapatan Transier				
1	2	1					Dana Desa				
1	2	2					Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
1	2	3					Alokasi Dana Desa				
1	2	4					Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				
1	2	5					Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten				
1	3						Pendapatan Lain-lain				
1	3	1					Hiba dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat				
1	3	2					Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah				
1	3	2	1				Hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga				
1	3	2	2				Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa				
							Jumlah Pendapatan				
2							BELANJA DESA				
2	1						BIDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
2	1	1					Pembayaran Penghasilan tetpa Kepala Desa dan perangkat desa				
2	1	1	1				Belanja Pegawai				
2	1	1	1	1			Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa				
2	1	1	1	1	1		Penghasilan tetap kepala desa				
2	1	1	1	1	2		Penghasilan tetap perangkat desa				
2	1	1	1	2			Penghasilan Staf Pemerintah Desa				
2	1	1	1	5			Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	5	1		Tunjangan Kepala Desa				
							- Tunjang Kesehatan				
							- Tunjangan Kecelakaan				
							- Tunjangan Kematian				
							- Tunjangan lain-lain				

2	1	1	1	5	2	Tunjangan Perangkat Desa				
						- Tunjang Kesehatan				
						- Tunjangan Kecelakaan				
						- Tunjangan Kematian				
						- Tunjangan lain-lain				
2	1	1	1	6		Tunjangan pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	6	1	Tunjangan pejabat Kepala				
2	1	1	1	6	2	Tunjangan Perangkat Desa				
2	1	2				Operasional perkantoran desa				
2	1	2	1			Belanja Pegawai				
2	1	2	1	10		Operasional Kepala desa dan perangkat desa				
2	1	2	1	10	1	Operasional Kepala Desa				
2	1	2	1	10	2	Operasional Perangkat Desa				
2	1	1	1	11		Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan				
2	1	1	1	11	1	Tunjangan Bendahara				
2	1	1	1	11	2	Tunjangan Pembantu Bendahara				
2	1	1	1	11	3	Tunjangan Pengurus Barang				
2	1	1	1	11	4	Tunjangan Pembantu Pengurus Barang				
2	1	2	2			Belanja Barang dan jasa				
2	1	2	2	1		Belanja bahan				
2	1	2	2	1	1	Belanja alat tulis kantor				
2	1	2	2	1	2	Belanja perlengkapan kantor				
2	1	2	2	1	3	Blenaja Perlatan kantor				
2	1	2	2	2		Belanja jasa kantor				
2	1	2	2	2	1	Belanja telepon				
2	1	2	2	2	2	Belanja air				
2	1	2	2	2	3	Belanja listrik				
2	1	2	2	2	4	Belanja surat kabar/majalah				
2	1	2	2	2	5	Belanja perangko/materai				
2	1	2	2	2	6	Belanja alat kebersihan				
2	1	2	2	2	7	Belanja langganan internet				
2	1	2	2	2	8	Belanja lain-lain				

2	1	2	2	3		BelanjaPemeliharaan				
2	1	2	2	3	1	Belanja pemeliharaan bangunan desa				
2	1	2	2	3	2	Belanja pemeliharaan peralatan kantor				
2	1	2	2	3	3	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor				
2	1	2	2	3	4	Belanja pemeliharaan komputer				
2	1	2	2	3	5	Belanja pemeliharaan Kendaraan dinas				
2	1	2	2	3	6	Belanja pemeliharaan taman				
2	1	2	2	3	7	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi				
2	1	2	2	3	8	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana produksi				
2	1	2	2	3	9	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian				
2	1	2	2	3	10	Belanja pemeliharaan sarana dan prasaranan sosil/keagamaan				
2	1	2	2	3	11	Belanja pemeliharaan saranan dan prasana pendidikan				
2	1	2	2	3	12	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan				
2	1	2	2	3	13	Belanja pemeliharaan lainnya				
2	1	2	2	4		Belanja cetak dan penggandaan				
2	1	2	2	4	1	Belanja pengadaan				
2	1	2	2	4	2	Belanja cetak dan jilid				
2	1	2	2	6		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
2	1	2	2	6	1	Belanja sewa meja dan kursi				
2	1	2	2	6	2	Belanja sewa tenda				
2	1	2	2	6	3	Belanja sewa soundsystem				
2	1	2	2	7		Belanja makan dan minum				
2	1	2	2	7	1	Belnaja makan dan minum rapat				
2	1	2	2	7	2	Belanja makan dan				

[illegible]

[illegible]

2	1	6	1	2		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	6	1	2	15	Pembayaran PBB				
2	1	7				Kegiatandst				
2	1	7	1			Belanja Pegawai				
2	1	7	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	7	3			Belanja Modal				
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2	2	1				Kegiatan..... ..				
2	2	1	1			Belanja Pegawai				
2	2	1	1	9		Honorarium Kegiatan				
2	2	1	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	2	1	2	1		Belanja Bahan				
2	2	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor				
2	2	1	2	11		Upah Tenaga Kerja				
2	2	1	2	12		Honorarium Narasumber/Ahli				
2	2	1	2	5		Sewa Alat Berat				
2	2	1	2	5	1	Belanja Sewa alat berat eskavator				
2	2	1	2	5	2	Belanja sewa motor greader				
2	2	1	2	5	3	Belanja sewa alat lain				
2	2	1	3			Belanja Modal				
2	2	1	3	3		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi				
2	2	1	3	3	1	Belanja modal jalan desa/usaha tani				
2	2	1	3	3	2	Belanja modal jembatan				
2	2	1	3	3	3	Belanja modal Drainase				
2	2	1	3	3	4	Belanja modal gorong- gorong				
2	2	1	3	3	5	Belanja modal talud jalan				
2	2	1	3	4		Belanja modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi				
2	2	1	3	4	1	Belanja modal dam/bendungan				
2	2	1	3	4	2	Belanja Modal irigasi tersier				
2	2	1	3	4	3	Belanja modal bangunan gedung pertanian/embung desa				
2	2	1	3	4	4	Belanja modal peralatan				

						pertanian				
2	2	1	2	5		Belanja modal pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian				
2	2	1	3	5	1	Belanja modal pasar desa				
2	2	1	3	5	2	Belanja pendirian dan pengembangan BUM Desa;				
2	2	1	3	5	3	Belanja modal pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;				
2	2	1	3	5	4	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;				
2	2	1	3	5	5	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;				
2	2	1	3	5	6	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;				
2	2	1	3	5	7	Belanja modal pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu				
2	2	1	3	5	8	Belanja Modal pengembangan Desa Wisata;				
2	2	1	3	6		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan				
2	2	1	3	6	1	Belanja modal gedung kegiatan pendidikan				
2	2	1	3	6	2	Belanja modal bahan alat ajar pendidikan				
2	2	1	3	6	2	Belanja modal peralatan pendidikan				
2	2	1	3	7		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana sosial/keagamaan				
2	2	1	3	7	1	Belanja pembangua tempat ibadah				

2	2	1	3	8		Belanja modal sarana dan prasarana kesehatan				
2	2	1	3	8	1	Belanja modal bangunan untuk kesehatan				
2	2	1	3	8	2	Belanja modal bahan untuk kesehatan				
2	2	1	3	8	3	Belanja modal untuk alat kesehatan				
2	2	2				Kegiatan.....dst				
2	2	2	1			Belanja Pegawai				
2	2	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	2	2	3			Belanja modal				
2	3					BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
2	3	1				Kegiatan.....				
2	3	1	1			Belanja pegawai				
2	3	1	1	9		Honorarium kegiatan				
2	3	1	2			Belanja Barang dan jasa				
2	3	1	2	1		Belanja bahan				
2	3	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor				
2	3	1	2	11		Upah tenaga kerja				
2	3	1	2	12		Honorarium narasumber/ahli				
2	3	1	2	13		Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
2	3	1	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
2	3	1	2	14	1	Uang penghargaan/operasional				
						- Lembaga pendidikan				
						- Lembaga kesehatan				
						- Lembaga ekonomi				
						- Lembaga sosial dan budaya				
						- Lembaga keagamaan				
						- Lembaga kemasyarakatan desa				
2	3	2				Kegiatan.....dst				
2	3	2	1			Belanja pegawai				
2	3	2	2			Belanja barang dan jasa				

							Bidang pemberdayaan masyarakat				
2	4	1					Kegiatan				
2	4	1	1				Belanja pegawai				
2	4	1	1	9			Honorarium narasumber/ahli				
2	4	1	2				Belanja barang dan jasa				
2	4	1	2	1			Belanja bahan				
2	4	1	2	1	1		Belanja alat tulis kantor				
2	4	1	2	11			Upah tenaga kkerja				
2	4	1	2	12			Hnorarium narasumber/ahli				
2	4	1	2	13			Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
2	4	1	2	14			Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
2	4	1	2	14	2		Beasiswa, santunan/bantuan				
							- kelompok usaha ekonomi produktif;				
							- kelompok perempuan;				
							- kelompok tani;				
							- kelompok masyarakat miskin;				
							- kelompok nelayan;				
							- kelompok pengrajin;				
							- kelompok pemerhati dan perlindungan anak;				
							- kelompok pemuda;				
							- orang terlantar				
							- masyarakat berprestasi				
2	4	2					Kegiatan				
2	4	2	1				Belanja pegawai				
2	4	2	2				Belanja barang dan jasa				
2	5						BIDANG TAK TERDUGA				
							JUMLAH BEI ANJA				
							SURPLUS/DEFISIT				
3							PEMBIAYAAN				
3	1						Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1					SILPA				
3	1	2					Pencairan Dana Cadangan				

3	1	3				Hasil KekayaanDesaYangdipisa hkan				
						JUMLAH (RP)				
3	2					Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2				Penyertaan Modal Desa				
						JUMLAH (RP)				

Tanggal
KEPALA DESA

TTD
(.....)

VI. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes

LAMBAG	PEMERINTAH DESA
PEMDES	KECAMATAN
	KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati
Kabupaten Nomor ... Tahun tentang,
Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
..... Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun
..... tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun
..... tentang (Lembaran daerah Kabupaten
..... Tahun Nomor);
6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Desa
Rp.....
- 2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
 - e. Bidang Tak Terduga Rp.....
 - Jumlah Belanja Rp.....
 - Surplus/Defisit Rp.....
 - = = = = =
- 3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.
 - Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....
 - = = = = =

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban RealisasiPelaksanaan APBDesaTahun Anggaran;
- 2. Lampiran II: Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

2	2	1	3	8		Belanja modal sarana dan prasarana kesehatan			
2	2	1	3	8	1	Belanja modal bangunan untuk kesehatan			
2	2	1	3	8	2	Belanja modal bahan untuk kesehatan			
2	2	1	3	8	3	Belanja modal untuk alat kesehatan			
2	2	2				Kegiatan.....dst			
2	2	2	1			Belanja Pegawai			
2	2	2	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	2	?	3			Belanja modal			
2	3					BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
2	3	1				Kegiatan.....			
2	3	1	1			Belanja pegawai			
2	3	1	1	9		Honorarium kegiatan			
2	3	1	2			Belanja Barang dan jasa			
2	3	1	2	1		Belanja bahan			
2	3	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor			
2	3	1	2	11		Upah tenaga kerja			
2	3	1	2	12		Honorarium narasumber/ahli			
2	3	1	2	13		Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
2	3	1	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat			
2	3	1	2	14	1	Uang penghargaan/operasional			
						- Lembaga pendidikan			
						- Lembaga kesehatan			
						- Lembaga ekonomi			
						- Lembaga sosial dan budaya			
						- Lembaga keagamaan			
						- Lembaga kemasyarakatan desa			
2	3	2				Kegiatan.....dst			
2	3	2	1			Belanja pegawai			
2	3	2	2			Belanja barang dan jasa			

2	4						Bidang pemberdayaan masyarakat					
2	4	1					Kegiatan					
2	4	1	1				Belanja pegawai					
2	4	1	1	9			Honorarium narasumber/ahli					
2	4	1	2				Belanja barang dan jasa					
2	4	1	2	1			Belanja bahan					
2	4	1	2	1	1		Belanja alat tulis kantor					
2	4	1	2	11			Upah tenaga kkerja					
2	4	1	2	12			Honorarium narasumber/ahli					
2	4	1	2	13			Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat					
2	4	1	2	14			Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat					
2	4	1	2	14	2		Beasiswa, santunan/bantuan					
							- kelompok usaha ekonomi produktif;					
							- kelompok perempuan;					
							- kelompok tani;					
							- kelompok masyarakat miskin;					
							- kelompok nelayan;					
							- kelompok pengrajin;					
							- kelompok pemerhati dan perlindungan anak;					
							- kelompok pemuda;					
							- orang terlantar					
							- masyarakat berprestasi					
2	4	2					Kegiatan					
2	4	2	1				Belanja pegawai					
2	4	2	2				Belanja barang dan jasa					
2	5						BIDANG TAK TERDUGA					
							JUMLAH BELANJA					
							SURPLUS/DEFISIT					
3							PEMBIAYAAN					
3	1						<i>Penerimaan Pembiayaan</i>					
3	1	1					SILPA					
3	1	2					Pencairan Dana Cadangan					

3	1	3				Hasil KekayaanDesaYangdipisa hkan				
						JUMLAH (RP)				
3	2					<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2				Penyertaan Modal Desa				
						JUMLAH (RP)				

Tanggal
KEPALA DESA

TTD
(.....)

VI. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes

LAMBAG PEMDES
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati
Kabupaten Nomor ... Tahun tentang,
Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
..... Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun
..... tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun
..... tentang (Lembaran daerah Kabupaten
..... Tahun Nomor);
6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Rp.....

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....

b. Bidang Pembangunan Rp.....

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....

e. Bidang Tak Terduga Rp.....

Jumlah Belanja Rp.....

Surplus/Defisit Rp.....

= = = = =

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

= = = = =

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban RealisasiPelaksanaan APBDesaTahun Anggaran;

2. Lampiran II: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Lampiran I
 Peraturan Desa
 Nomor Tahun
 Tentang Laporan
 Pertanggungjawaban
 Realisasi Pelaksanaan APBDesa
 Tahun Anggaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING						URAIAN	JUMLA H ANGGA RAN (Rp.)	JUMLA H REALIS ASI (Rp)	LEBIH KURAN G	KET
1						2	3	4	5	6
1						PENDAPATAN				
1	1					<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1				Hasil Usaha				
1	1	1	1			Hasil Laba Bumdes				
1	1	2				Hasil Aset Desa				
1	1	2	1			Tanah Desa				
1	1	2	2			Bandes				
1	1	2	3			Pasar desa				
1	1	2	4			Pasar Hewan				
1	1	2	5			Bangunan Desa				
1	1	2	5	1		Kios Desa				
1	1	2	5	2		Gedung Pertemuan Desa				
1	1	2	5	3		Gedung Olah Raga				
1	1	2	5	4		Bangunan Desa Lainnya				
1	1	2	6			Hutan Milik Desa				
1	1	2	7			Mata Air Milik Desa				
1	1	2	8			Pemandian Umum				
1	1	2	9			Obyek Rekreasi Desa				
1	1	2	10			Lapangan Desa				
1	1	2	11			Aset Desa Lainnya				
1	1	3				Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3	1			Swadaya dan Partisipasi				
1	1	3	2			Gotong Royong				
1	1	4				Lain-lain Pendapatan Asli Desa				
1	1	4	1			Pungutan Desa				
1	1	4	2			Hasil Penjualan Kekayaan selain Tanah				

							yang dipisahkan				
1	1	4	3				Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun berjalan				
1	1	4	4				Bunga Simpanan Uang di Bank				
1	2						Pendapatan Transfer				
1	2	1					Dana Desa				
1	2	2					Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
1	2	3					Alokasi Dana Desa				
1	2	4					Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				
1	2	5					Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten				
1	3						Pendapatan Lain-lain				
1	3	1					Hiba dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat				
1	3	2					Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah				
1	3	2	1				Hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga				
1	3	2	2				Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa				
							Jumlah Pendapatan				
2							BELANJA DESA				
2	1						BIDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
2	1	1					Pembayaran Penghasilan tetpa Kepala Desa dan perangkat desa				
2	1	1	1				Belanja Pegawai				
2	1	1	1	1			Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa				
2	1	1	1	1	1		Penghasilan tetap kepala desa				
2	1	1	1	1	2		Penghasilan tetap perangkat desa				
2	1	1	1	2			Penghasilan Staf Pemerintah Desa				
2	1	1	1	5			Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	5	1		Tunjangan Kepala Desa				
							- Tunjang Kesehatan				
							- Tunjangan Kecelakaan				
							- Tunjangan Kematian				

						- Tunjangan lain-lain				
2	1	1	1	5	2	Tunjangan Perangkat Desa				
						- Tunjang Kesehatan				
						- Tunjangan Kecelakaan				
						- Tunjangan Kematian				
						- Tunjangan lain-lain				
2	1	1	1	6		Tunjangan pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	6	1	Tunjangan pejabat Kepala				
2	1	1	1	6	2	Tunjangan Perangkat Desa				
2	1	2				Operasional perkantoran desa				
2	1	2	1			Belanja Pegawai				
2	1	2	1	10		Operasional Kepala desa dan perangkat desa				
2	1	2	1	10	1	Operasional Kepala Desa				
2	1	2	1	10	2	Operasional Perangkat Desa				
2	1	1	1	11		Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan				
2	1	1	1	11	1	Tunjangan Bendahara				
2	1	1	1	11	2	Tunjangan Pembantu Bendahara				
2	1	1	1	11	3	Tunjangan Pengurus Barang				
2	1	1	1	11	4	Tunjangan Pembantu Pengurus Barang				
2	1	2	2			Belanja Barang dan jasa				
2	1	2	2	1		Belanja bahan				
2	1	2	2	1	1	Belanja alat tulis kantor				
2	1	2	2	1	2	Belanja perlengkapan kantor				
2	1	2	2	1	3	Blenaja Perlatan kantor				
2	1	2	2	2		Belanja jasa kantor				
2	1	2	2	2	1	Belanja telepon				
2	1	2	2	2	2	Belanja air				
2	1	2	2	2	3	Belanja listrik				
2	1	2	2	2	4	Belanja surat kabar/majalah				
2	1	2	2	2	5	Belanja perangko/materai				
2	1	2	2	2	6	Belanja alat kebersihan				
2	1	2	2	2	7	Belanja langganan				

						internet				
2	1	2	2	2	8	Belanja lain-lain				
2	1	2	2	3		Belanja Pemeliharaan				
2	1	2	2	3	1	Belanja pemeliharaan bangunan desa				
2	1	2	2	3	2	Belanja pemeliharaan peralatan kantor				
2	1	2	2	3	3	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor				
2	1	2	2	3	4	Belanja pemeliharaan computer				
2	1	2	2	3	5	Belanja pemeliharaan Kendaraan dinas				
2	1	2	2	3	6	Belanja pemeliharaan taman				
2	1	2	2	3	7	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi				
2	1	2	2	3	8	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana produksi				
2	1	2	2	3	9	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian				
2	1	2	2	3	10	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana sosil/keagamaan				
2	1	2	2	3	11	Belanja pemeliharaan sarana dan prasana pendidikan				
2	1	2	2	3	12	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan				
2	1	2	2	3	13	Belanja pemeliharaan lainnya				
2	1	2	2	4		Belanja cetak dan penggandaan				
2	1	2	2	4	1	Belanja pengadaan				
2	1	2	2	4	2	Belanja cetak dan jilid				
2	1	2	2	6		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
2	1	2	2	6	1	Belanja sewa meja dan kursi				
2	1	2	2	6	2	Belanja sewa tenda				
2	1	2	2	6	3	Belanja sewa soundsystem				
2	1	2	2	7		Belanja makan dan minum				
2	1	2	2	7	1	Belanja makan dan				

[illegible]

2	1	3	1	8		Uang Sidang BPD				
2	1	3	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	3	2	1		Belanja Bahan				
2	1	3	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor				
2	1	3	2	1	2	Belanja Perlengkapan Kantor				
2	1	3	2	1	3	Belanja Peralatan kantor				
2	1	3	2	4		Belanja cetak dan penggandaan				
2	1	3	2	4	1	Belanja pengadaan				
2	1	3	2	4	2	Belanja cetak dan jilid				
2	1	3	2	7		Belanja makan dan minum				
2	1	3	2	7	1	Belanja makan dan minum rapat				
2	1	3	2	7	2	Belanja makan dan minum peninjauan				
2	1	3	2	7	3	Belanja makan dan minum tamu				
2	1	3	2	8		Belanja Pakaian Dinas				
2	1	3	2	8	1	Belanja Pakain Dinas Ketua BPD				
2	1	3	2	8	2	Belanja Pakain Dinas Sekretaris BPD				
2	1	3	2	8	3	Belanja Pakaian Dinas Anggota BPD				
2	1	4				Pembayaran Insentif RT/RW				
2	1	4	1			Belanja Pegawai				
2	1	4	1	9		Inentif RT/RW				
2	1	4	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	5				Kegiatan pembayaran tunjangan masa akhir jabatan kepala desa dan perangkat desa				
2	1	5	1			Belanja Pegawai				
2	1	5	1	3		Tunjangan Akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	5	1	3	1	Tunjangan Akhir masa jabatan Kepala Desa				
2	1	5	1	3	2	Tunjangan Akhir masa jabatan Perangkat Desa				
2	1	6				Kegiatan Insesifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
2	1	6	1			Belanja Pegawai				

2	1	6	1	9		Honorarium Kegiatan				
2	1	6	1	2		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	6	1	2	15	Pembayaran PBB				
2	1	7				Kegiatandst				
2	1	7	1			Belanja Pegawai				
2	1	7	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	7	3			Belanja Modal				
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2	2	1				Kegiatan.....				
2	2	1	1			Belanja Pegawai				
2	2	1	1	9		Honorarium Kegiatan				
2	2	1	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	2	1	2	1		Belanja Bahan				
2	2	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor				
2	2	1	2	11		Upah Tenaga Kerja				
2	2	1	2	12		Honorarium Narasumber/Ahli				
2	2	1	2	5		Sewa Alat Berat				
2	2	1	2	5	1	Belanja Sewa alat berat eskavator				
2	2	1	2	5	2	Belanja sewa motor grader				
2	2	1	2	5	3	Belanja sewa alat lain				
2	2	1	3			Belanja Modal				
2	2	1	3	3		Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi				
2	2	1	3	3	1	Belanja modal jalan desa/usaha tani				
2	2	1	3	3	2	Belanja modal jembatan				
2	2	1	3	3	3	Belanja modal Drainase				
2	2	1	3	3	4	Belanja modal gorong- gorong				
2	2	1	3	3	5	Belanja modal talud jalan				
2	2	1	3	4		Belanja modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi				
2	2	1	3	4	1	Belanja modal dam/bendungan				
2	2	1	3	4	2	Belanja Modal irigasi tersier				
2	2	1	3	4	3	Belanja modal bangunan gedung				

						pertanian/embung desa				
2	2	1	3	4	4	Belanja modal peralatan pertanian				
2	2	1	2	5		Belanja modal pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian				
2	2	1	3	5	1	Belanja modal pasar desa				
2	2	1	3	5	2	Belanja pendirian dan pengembangan BUM Desa;				
2	2	1	3	5	3	Belanja modal pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;				
2	2	1	3	5	4	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;				
2	2	1	3	5	5	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;				
2	2	1	3	5	6	Belanja Modal pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;				
2	2	1	3	5	7	Belanja modal pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu				
2	2	1	3	5	8	Belanja Modal pengembangan Desa Wisata;				
2	2	1	3	6		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan				
2	2	1	3	6	1	Belanja modal gedung kegiatan pendidikan				
2	2	1	3	6	2	Belanja modal bahan alat ajar pendidikan				
2	2	1	3	6	2	Belanja modal peralatan pendidikan				
2	2	1	3	7		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana sosial/keagamaan.				

2	2	1	3	7	1	Belanja pembanguna tempat ibadah				
2	2	1	3	8		Belanja modal sarana dan prasarana kesehatan				
2	2	1	3	8	1	Belanja modal bangunan untuk kesehatan				
2	2	1	3	8	2	Belanja modal bahan untuk kesehatan				
2	2	1	3	8	3	Belanja modal untuk alat kesehatan				
2	2	2				Kegiatar.....dst				
2	2	2	1			Belanja Pegawai				
2	2	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	2	2	3			Belanja modal				
2	3					BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
2	3	1				Kegiatan.....				
									
2	3	1	1			Belanja pegawai				
2	3	1	1	9		Honorarium kegiatan				
2	3	1	2			Belanja Barang dan jasa				
2	3	1	2	1		Belanja bahan				
2	3	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor				
2	3	1	2	11		Upah tenaga kerja				
2	3	1	2	12		Honorarium narasumber/ahli				
2	3	1	2	13		Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
2	3	1	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
2	3	1	2	14	1	Uang penghargaan/operasiona l				
						- Lembaga pendidikan				
						- Lembaga kesehatan				
						- Lembaga ekonomi				
						- Lembaga sosial dan budaya				
						- Lembaga keagamaan				
						- Lembaga kemasyarakatan desa				
2	3	2				Kegiatan.....dst				

2	3	2	1			Belanja pegawai				
2	3	2	2			Belanja barang dan jasa				
2	4					Bidang pemberdayaan masyarakat				
2	4	1				Kegiatan				
2	4	1	1			Belanja pegawai				
2	4	1	1	9		Honorarium narasumber/ahli				
2	4	1	2			Belanja barang dan jasa				
2	4	1	2	1		Belanja bahan				
2	4	1	2	1	1	Belanja alat tulis kantor				
2	4	1	2	11		Upah tenaga kkerja				
2	4	1	2	12		Honorarium narasumber/ahli				
2	4	1	2	13		Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
2	4	1	2	14		Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat				
2	4	1	2	14	2	Beasiswa, santunan/bantuan				
						- kelompok usaha ekonomi produktif;				
						- kelompok perempuan;				
						- kelompok tani;				
						- kelompok masyarakat miskin;				
						- kelompok nelayan;				
						- kelompok pengrajin;				
						- kelompok pemerhati dan perlindungan anak;				
						- kelompok pemuda;				
						- orang terlantar				
						- masyarakat berprestasi				
2	4	2				Kegiatan				
2	4	2	1			Belanja pegawai				
2	4	2	2			Belanja barang dan jasa				
2	5					BIDANG TAK TERDUGA				
						JUMLAH BELANJA				
						SURPLUS/DEFISIT				
3						PEMBIAYAAN				
3	1					<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1				SILPA				

3	1	2				Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3				Hasil KekayaanDesaYangdipisa hkan				
						JUMLAH (RP)				
3	2					<i>Pengeluaran Pembiayacn</i>				
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2				Penyertaan Modal Desa				
						JUMLAH (RP)				

Tanggal
KEPALA DESA

TTD
(.....)

Lampiran II
Peraturan Desa
Nomor Tahun
Tentang Laporan Kekayaan
Milik Desa
Tahun Anggaran

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
4. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
5. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
6. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I – II)		

TANGGAL
TTD
(KEPALA DESA)

Penjelasan tabel:

- 1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.*
- 2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.*
- 3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.*
- 4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.*
- 5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.*
- 6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.*
- 7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.*
- 8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.*

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

LampiranIII Peraturan Desa
Nomor :
Tentang : Program Sektoral dan Program
Daerah yang masuk Ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal
Desa
Kecamatan
Kabupaten

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4) Total (1 s/d 4)							Rp. Rp.

tanggal,
.....
Kepala Desa
(.....)

VII. BUKU PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
A. BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No	Tgl	KODE REKENING	URAIAN	PENERIM AAN (Rp.)	PENGEL UARAN (Rp.)	NO BUKT I	JUMLA H PENGEL UARAN KOMUL ATIF	SALD O
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				Rp.	Rp.			

....., tanggal

MENGETAHUI

BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
- Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
- Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

B. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

- Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

C. BUKU BANK DESA

BUKU BANK DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

BULAN :

BANK CABANG :

REK. NO. :

N o .	TANG GAL TRAN SAKSI I	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	Pajak (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

tanggal
BENDAHARA DESA,

.....

.....

- Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

Pj. BUPATI BOALEMO,
YUSUF GLASI